

SKRIPSI
FRAMING PEMBERITAAN KENAIKAN PPN 12 %
DI PORTAL BERITA DETIK NEWS



OLEH

ST.MAHDINAR MUHSENG

NIM: 19.3600.010

PROGRAM STUDI JURNALISTIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2025

**FRAMING PEMBERITAAN KENAIKAN PPN 12 %
2026 DI PORTAL BERITA DETIK NEWS**



OLEH

ST.MAHDINAR MUHSENG

NIM: 19.3600.010

Skripsi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Pada Program Studi Jurnalistik Islam

Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI JURNALISTIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

**FRAMING PEMBERITAAN KENAIKAN PPN 12 %
DI PORTAL BERITA DETIK NEWS**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Program Studi Jurnalistik Islam

Disusun dan diajukan oleh

ST.MAHDINAR MUHSENG

NIM: 19.3600.010

**PROGRAM STUDI JURNALISTIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : *Framing* Pemberitaan Kenaikan Ppn 12%
Di Portal Berita Detik News

Nama Mahasiswa : St.Mahdinar Muhseng

Nomor Induk Mahasiswa : 19.3600.010

Program Studi : Jurnalistik Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Nomor : B -546/In.39/PP.00.9/PPs.05/02/2024

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Nahrul Hayat, M.I.Kom

NIP

: 199011302018011001

Mengetahui,

Dekan,

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. A. Nurdin, M.Hum.

NIP. 195906241998031001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : *Framing* Pemberitaan Kenaikan Ppn 12% Di Portal
Berita Detik News

Nama Mahasiswa : St.Mahdinar Muhseng

Nomor Induk Mahasiswa : 19.3600.010

Program Studi : Jurnalistik Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Nomor : B -546/In.39/PP.00.9/PPs.05/02/2024

Tanggal Kelulusan : 14 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

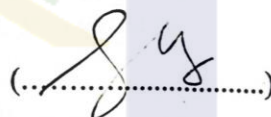
Nahrul Hayat, M.I.Kom.

(Ketua)



Mifda Hilmiyah, M.I.Kom.

(Anggota)



Maemunah, M.M.Cs.

(Anggota)



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dr. A. Nurkidam, M.Hum
NIP. 19641231 1992031 045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. Karena rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Framing Pemberitaan Kenaikan Ppn 12% Di Portal Berita Detik News*” ini dengan baik dan tepat waktu sebagai syarat untuk meraih gelar S1. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda tercinta kita, Nabi Muhammad Saw, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya diakhirat nanti.

Rasa syukur dan terima kasih penulis haturkan yang setulus tulusnya kepada Suami saya terkasih Muhaimin, anak saya yang lucu Meydina dan kedua orang tua yang saya hormati dan saya cintai ayahanda Muhseng dan Ibunda Hasmia, saudara saudara saya yang saya cintai, serta seluruh pihak keluarga yang selama ini telah membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Selain itu penulis ingin mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Bapak Nahrul Hayat, M.I.Kom sebagai dosen pembimbing yang tidak henti hentinya membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya pihak yang telah memberikan dukungan, baik yang berbentuk moral dan material.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani M.Ag Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan memperhatikan kinerja kami dalam berkiprah dilembaga kemahasiswaan, demi kemajuan IAIN Parepare

2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ushuludddin, Adab dan Dakwah atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ketua Program studi Jurnalistik Islam untuk semua ilmu serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
4. Bapak/Ibu Dosen dan jajaran staf administrasi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah banyak membantu penulis selama berstatus mahasiswa.
5. Kepala perpustakaan dan jajaran perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam menyiapkan sumber bacaan sebagai referensi skripsi ini.
6. Seluruh pegawai dan staf yang bekerja di Lembaga IAIN Parepare atas segala bantuandan arahnya dalam proses penyelesaian studi penulis.
7. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN
8. Parepare yang begitu banyak memberikan masukan dan alur pemikirannya masing-masing dan terkhusus sahabat saya yang begitu banyak memberikan bantuan dan motivasi kepada Penulis dalam menjalani Studi di IAIN Parepare.
9. Saudara yang tidak ada hentinya memberikan bantuan dan mendukung sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah disisi-Nya dapat bermanfaat sebagai referensi bacaan bagi orang lain, khususnya bagi mahasiswa IAIN Parepare.

Aamin yarabbal" alamin

Parepare, 11 Juni 2025

14 Jumadil Akhir 1447 H

Penulis


St. Mahdinar Muhseng
NIM. 19.3600.010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangandibawah ini:

Nama Mahasiswa : St.Mahdinar Muhseng
Nomor Induk Mahasiswa : 19.3600.010
Tempat/Tgl Lahir : Parepare 25 April 2001
Program Studi : Jurnalistik Islam
Fakultas : Fakultas Ushuludddin, Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : *Framing Pemberitaan Kenaikan Ppn 12% Di Portal Berita Detik News*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan plagiat atas keseluruhan skripsi, kecuali tulisan sebagai bentuk acuan atau kutipan dengan mengikuti penulisan karya ilmiah yang lazim, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 08 Juni 2025
14 Jumadil Akhir 1445 H

Penyusun


St.Mahdinar Muhseng
NIM. 19.3600.010

ABSTRAK

St.Mahdinar Muhseng. *Framing Pemberitaan Kenaikan Ppn 12% di Portal Berita Detik News* (Dibimbing oleh Nahrul Hayat)

Framing pemberitaan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% di portal berita Detik News menunjukkan bagaimana media melakukan konstruksi realitas terhadap kebijakan ekonomi. Detik News cenderung menampilkan pemberitaan yang menekankan legitimasi kebijakan melalui narasi legal-formal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis *Framing* Pemberitaan Kenaikan Ppn 12% di Portal Berita Detik News

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis teks untuk memahami bagaimana framing dilakukan oleh media Detik News dalam memberitakan kenaikan PPN 12%. Objek penelitian berupa sepuluh artikel berita yang dipublikasikan Detik News sejak 1 November hingga 31 Desember 2024, dengan fokus pada teks, judul, gambar, dan narasi yang membingkai isu tersebut. Penelitian ini mengacu pada model framing dari Robert Entman yang mencakup definisi masalah, diagnosis penyebab, penilaian moral, dan saran solusi. Data dikumpulkan melalui observasi, analisis isi, dan dokumentasi artikel berita, serta didukung oleh data sekunder berupa literatur akademik, laporan pemerintah, dan media lain yang relevan. Teknik analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi pola pemberitaan dan mengungkap kecenderungan media dalam membentuk persepsi publik terhadap kebijakan kenaikan PPN 12%.

Hasil penelitian ini merujuk pada 10 konten berita terkait dengan PPN 12% pada media Detik.com sehingga dijelaskan bahwa media Detik news melakukan framing pemberitaan mengenai kenaikan PPN 12% dengan identifikasi definisi masalah yaitu bahwa kebijakan kenaikan PPN diposisikan sebagai isu fiskal yang menimbulkan kekhawatiran publik serta polemik di kalangan elite politik. Diagnosis masalah yaitu keputusan pemerintah dianggap belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan kurangnya komunikasi mengenai penerapan selektif kebijakan tersebut. Penilaian moral yaitu kebijakan fiskal seharusnya berpihak pada keadilan sosial dan tidak memberatkan rakyat kecil, sementara elite politik dinilai lebih banyak saling menyalahkan daripada memberikan solusi. Saran solusi yaitu pemerintah disarankan menerapkan kebijakan secara selektif hanya untuk barang mewah, memperkuat komunikasi publik, menjaga daya beli masyarakat, serta memberikan stimulus ekonomi untuk memitigasi dampak negatif.

Kata Kunci: *Framing*, Kenaikan Ppn 12%, Portal Berita Detik News.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teoritis	11
C. Tinjauan Konseptual	18
D. Kerangka Pikir	24
BAB III	25
METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	25
B. Objek Penelitian	25
C. Fokus Penelitian	26
D. Waktu dan Tempat Penelitian	26

E. Jenis dan Sumber Data	27
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Teknik Analisis Data	30
BAB IV	32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian	32
B. Pembahasan	83
BAB V	90
PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	95
BIODATA PENULIS	98

DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
4.1	Berita 6 Desember 2024	33
4.2	Berita 4 Desember 2024	38
4.3	Berita 20 Desember 2024	44
4.4	Berita 1 Desember 2024	50
4.5	Berita 6 Desember 2024	55
4.6	Berita 28 Desember 2024	60
4.7	Berita 19 Desember 2024	64
4.8	Berita 19 Desember 2024	70
4.9	Berita 27 Desember 2024	75
4.10	Berita 1 Januari 2025	79

DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran Lampiran
1	Sk Penetapan Pembimbing
2	Hasil Turnitin
3	Biodata Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan sa
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ya
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	W	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(’).

2. Vokal

1. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

1. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 الْحَجُّ : *al-hajj*
 نُعَمَّ : *nu‘ima*
 عُدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah *bi*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
 عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū).

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik. Opini publik dapat dipengaruhi oleh bagaimana suatu isu disajikan dan diberitakandi media, termasuk dalam hal kebijakan suatu instansi, khususnya instansi pemerintahan yang sangat berdampak pada masyarakat. Pentingnya informasi yang dikelola oleh media terletak pada kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang objektif dan komprehensif kepada publik. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen yang dapat membentuk persepsi dan interpretasi masyarakat terhadap suatu kebijakan.¹

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kebijakan ini menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, pelaku usaha, serta pengamat ekonomi karena dinilai dapat berdampak langsung terhadap harga barang dan jasa, serta daya beli masyarakat secara umum. Oleh karena itu, pemberitaan mengenaikenaikan PPN menjadi sorotan penting dalam ruang publik.

¹ Waziz, A. "Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik." *Jurnal Publica Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Lampung*, 5(1), 21-31. (2018). <https://journal.uml.ac.id/PF/article/view/143>

Pemberitaan mengenai kenaikan PPN 12% menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Sebagian pihak melihat kebijakan ini sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara, sementara yang lain menganggapnya sebagai beban tambahan bagi masyarakat, terutama di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi.² Media memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana informasi tersebut disampaikan kepada publik. Pemilihan kata, kutipan narasumber, serta fokus berita dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini.

Pemberitaan mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% telah menjadi isu yang ramai dibicarakan dan menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan masyarakat. Di satu sisi, pemerintah melalui berbagai kanal media menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang bertujuan untuk memperkuat struktur penerimaan negara dan memperluas basis pajak. Kenaikan tersebut dianggap sebagai langkah rasional dalam menjaga kestabilan fiskal dan membiayai berbagai program pembangunan serta perlindungan sosial.

Portal berita daring seperti Detik News sebagai salah satu media arus utama dengan jumlah pembaca yang besar di Indonesia, memiliki pengaruh signifikan dalam membingkai isu-isu kebijakan publik. Cara media menyusun narasi, memilih kutipan narasumber, serta menekankan aspek-aspek tertentu dari kebijakan, dapat memengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi maupun dampak dari kebijakan

² Santoso, M. G., & Fahn, A. (2022). "Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik dalam Konteks Kewarganegaraan." *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(2), 157-160.

tersebut. Dalam hal ini pendekatan analisis framing menjadi penting untuk mengungkap bagaimana konstruksi media terhadap isu kenaikan PPN disusun, serta bagaimana makna dibalik penyajian berita tersebut disampaikan kepada khalayak. Alasan pemilihan Detik News dikarenakan beberapa aspek salah satunya yaitu berdasarkan jumlah viewers suatu media, Detik News memiliki jumlah viewers yang dapat dikategorikan sangat tinggi hingga mencapai 20 ribu viewers.

Menurut Suharyo bahwa framing sebagai cara media dalam menyusun dan menafsirkan realitas, yang pada akhirnya dapat memengaruhi persepsi khalayak.³ Dalam pemberitaan kenaikan PPN 12%, framing dapat dilihat dari bagaimana media mengemas narasi, memilih angle berita, dan menampilkan narasumber yang mendukung atau menentang kebijakan tersebut.

Urgensi penelitian ini untuk memahami bagaimana framing pemberitaan dapat mencerminkan kecenderungan media dalam menyajikan informasi. Media memiliki kebijakan redaksional dan kepentingan tertentu yang dapat mempengaruhi cara mereka memberitakan suatu isu. Dengan menganalisis pemberitaan di Detik News, dapat diketahui apakah media ini lebih condong untuk menampilkan perspektif pemerintah, perspektif masyarakat, atau memberikan keseimbangan dalam pemberitaan.

Studi mengenai framing telah banyak dilakukan dalam berbagai isu kebijakan publik. Misalnya, penelitian mengenai framing kebijakan subsidi energi, pajak, dan regulasi ekonomi lainnya menunjukkan bahwa media dapat membentuk pola pikir masyarakat terhadap kebijakan tertentu. Dalam isu penelitian ini terkait dengan kenaikan PPN 12% dimana analisis framing dapat membantu mengungkap sejauh

³ Suharyo, *Kajian Bahasa dengan Pendekatan Analisis Framing*. (Universitas Diponegoro.

mana Detik News menampilkan informasi yang objektif, atau justru lebih cenderung memihak kepada salah satu pihak.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis melakukan riset awal terkait dengandeskripsi framing berita sebagai berikut:



Gambar 1.1 Pemberitaan PPT 12% Detik.News

Berdasarkan hasil riset tersebut diketahui bahwa berita-berita detikcom menyoroti kenaikan PPN sebagai kebijakan yang menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Misalnya, terdapat petisi yang meminta pembatalan kenaikan PPN karena dianggap memberatkan masyarakat, Detik News mengaitkan kenaikan PPN dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR serta Dalam beberapa artikel, detik news menyajikan pandangan dari berbagai pihak, seperti ekonom dan legislator, yang mengkritisi kebijakan ini karena berpotensi memberatkan pelaku UMKM dan masyarakat menengah ke bawah. Melalui elemen framing ini, Detik News membingkai kenaikan PPN 12% sebagai kebijakan yang kontroversial dengan menampilkan berbagai perspektif dan dampaknya terhadap masyarakat. Framing ini dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan

tersebut, baik dari sisi legitimasi hukum maupun implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini juga memiliki relevansi praktis dalam bidang komunikasi dan jurnalistik. Dengan memahami bagaimana framing bekerja dalam pemberitaan kebijakan publik, jurnalis dan media dapat lebih menyadari dampak dari cara mereka mengemas informasi. Selain itu, masyarakat juga dapat menjadi lebih kritis dalam mengonsumsi berita dan memahami berbagai sudut pandang dalam suatu isu kebijakan.

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan kajian bagi akademisi dan praktisi di bidang komunikasi politik dan media studies. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur yang berkaitan dengan framing media dalam kebijakan ekonomi, khususnya dalam konteks perpajakan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam memahami bagaimana media massa, khususnya Detik News, membentuk opini publik mengenai kebijakan kenaikan PPN. Dengan pendekatan analisis framing, penelitian ini akan menggali lebih dalam bagaimana strategi media dalam mengemas berita dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap kebijakan perpajakan di Indonesia dengan merumuskan judul penelitian yaitu “*Framing Pemberitaan Kenaikan PPN 12% di Portal Berita Detik News*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat peneliti rumuskan pertanyaan yaitu: Bagaimana *framing* Pemberitaan Kenaikan PPN 12% di Portal Berita Detik News?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis framing pemberitaan kenaikan PPN 12% di Portal Berita Detik News.

D. Kegunaan Penelitian

Adapunkegunaan penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan pemahaman tentang teori framing dalam konteks media massa. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada kajian komunikasi massa dan ilmu jurnalistik, terutama dalam mengidentifikasi bagaimana media mengkonstruksi realitas sosial melalui framing pemberitaan.

2. Kegunaan Praktis

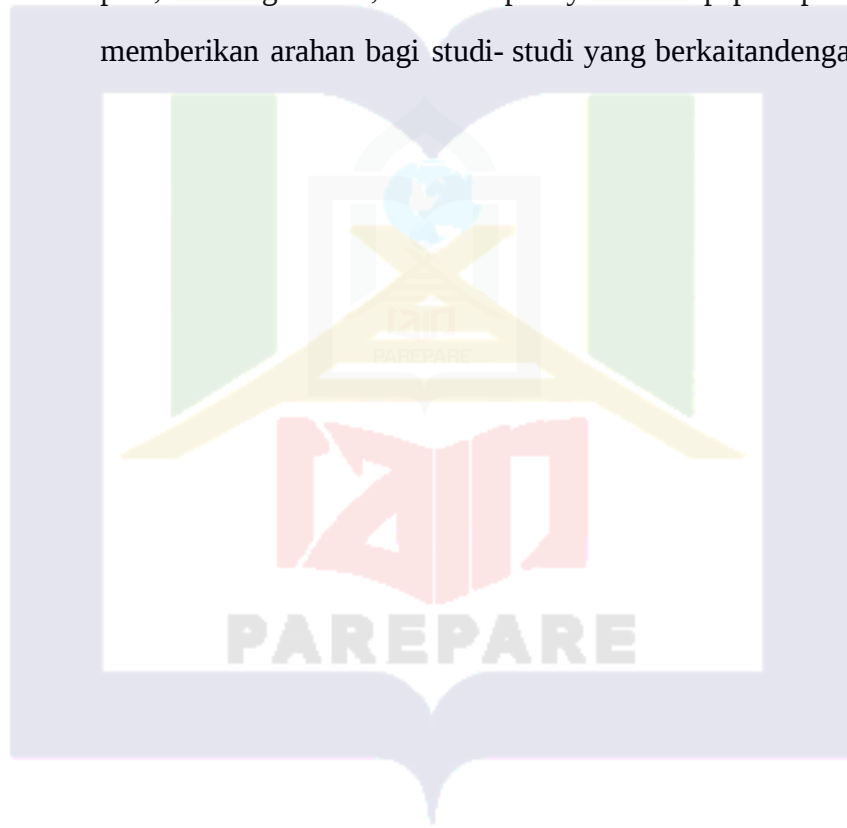
a. Kepada Program Studi Jurnalistik Islam

Penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi program studi Jurnalistik Islam dalam memperdalam pemahaman tentang peran media dalam pemberitaan isu-isu sosial dan ekonomi, serta membangun kesadaran tentang pentingnya objektivitas dalam menyajikan berita. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pelatihan bagi mahasiswa jurnalistik,

terutama dalam teknik framing yang etis dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi.

b. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh framing dalam pemberitaan isu-isu politik dan ekonomi lainnya. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam menggali lebih dalam mengenai dinamika hubungan antara kebebasan pers, framing media, dan dampaknya terhadap persepsi publik, serta memberikan arahan bagi studi-studi yang berkaitan dengan media.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan dengan judul skripsi yang peneliti teliti, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu penelitian yang mengkajitentang akulturasibudaya dan islam di antaranya:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Elfa dengan judul “Analisis Drone Emprit Kenaikan Harga BBM 2022 dalam Perspektif UU Keterbukaan Informasi Publik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentimen yang mendominasi adalah sentimen negatif yang berarti masyarakat cenderung untuk menolak kenaikan harga BBM. Sentimen negatif ini menjadi indikasi adanya perilaku pemerintah yang kurang tepat dalam menyampaikan suatu informasi dan kebijakan kepada publik. Setiap postingan dari Drone Emprit dapat diketahui siapa saja yang menggunakan akun asli dan yang menggunakan akun bot. Secara keseluruhan, analisis bot menunjukkan akun Twitter yang membicarakan topik kenaikan harga BBM memiliki bot score sebesar 1,55. Jika bot score semakin kecil maka jumlah akun yang terindikasi sebagai bot semakin sedikit.⁴

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu kedua penelitian ini sama-sama membahas respons terhadap kebijakan ekonomi pemerintah yang berdampak pada masyarakat luas, yaitu kenaikan harga BBM

⁴ Elfa, “Analisis Drone Emprit Kenaikan Harga BBM 2022 dalam Perspektif UU Keterbukaan Informasi Publik”(Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi Volume 3 Nomor 1 (2022) 57-73 <https://e-journal.unair.ac.id/Medkom>)

dan kenaikan PPN. Keduanya juga menggunakan pendekatan analisis media untuk melihat bagaimana isu tersebut dikomunikasikan ke publik serta bagaimana respon atau persepsi yang muncul. Tujuan utama dari kedua penelitian ini adalah untuk mengetahui cara informasi disampaikan kepada masyarakat dan bagaimana informasi tersebut diterima atau dimaknai oleh publik melalui media sosial atau media massa. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu penelitian Elfa menggunakan metode analisis data media sosial melalui platform Drone Emprit, dengan fokus pada sentimen masyarakat terhadap kebijakan kenaikan harga BBM Sementara itu, penelitian tentang framing kenaikan PPN 12% lebih menitikberatkan pada analisis bagaimana media online, dalam hal ini Detik News, membingkai isu tersebut.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Juliana Sinaga dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan Kenaikan Harga Bbm Subsidi Pada Media Online Topmetronews Periode September 2022”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Framing pemberitaan tentang kenaikan harga BBM Subsidi di media online TopmetroNews. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan model analisis Framing yang dibuat oleh Pan dan Kosicki (1993). Dalam penelitian ini menganalisis berita dengan empat elemen tersebut terhadap sembilan pemberitaan kenaikan harga BBM di media online Topmetronews. Datadata dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sembilan artikel berita yang dimuat di Topmetronews yang dianalisis melalui struktur Sintaksis,

Skrip, Tematik dan Retoris selalu menekankan penolakan kenaikan harga BBM yang berakibat terhadap ekonomi masyarakat.⁵

Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana suatu isu dikonstruksikan oleh media serta Kedua penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan studi pustaka terhadap berita-berita yang terbit di media online. Namun, perbedaan utamanya terletak pada objek yang dianalisis dan media yang menjadi fokus. Penelitian Juliana menganalisis sembilan berita mengenai kenaikan BBM subsidi di portal Topmetronews, sedangkan penelitian tentang kenaikan PPN 12% difokuskan pada pemberitaan yang dimuat di portal Detik News. Selain itu, fokus isu yang diangkat juga berbeda, yaitu dampak ekonomi akibat kenaikan BBM pada masyarakat versus respon publik dan pemerintah terhadap kebijakan kenaikan pajak PPN.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Nur Hidayat dengan judul “Analisis Framing Independensi Pemberitaan Media Online Detik.Com Pasca Pemungutan Suara Pemilihan Presiden 17 April 2019”. metode penelitian deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan analisis framing model Robert N. Entman dengan meneliti unsur define problem (definisi masalah), diagnose cause (perkiraan masalah dari sumber masalah) make moral judgement (penekanan keputusan moral), dan treatment recommendation (penyelesaian masalah). Hasil penelitian

⁵Juliana, “Analisis Framing Pemberitaan Kenaikan Harga Bbm Subsidi Pada Media Online Topmetronews Periode September 2022, (*JurnalIlmiah. Universitas Brawijaya*, 2020)

ini menunjukkan bahwa media online Detikcom berupaya memenuhi objektivitas dari ketiga aspek yakni nilai, proses, dan bahasa. Media online Detikcom berupaya tidak membuat atau mendukung dalam memberitakan salah satu paslon 01 maupun 02 untuk isipemberitaanya.⁶

Perbedaan kedua penelitian ini yaitu keduanya sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan analisis framing serta kedua penelitian ini adalah bagaimana media membingkai suatu isu dan berusaha menjaga objektivitas dalam pemberitaannya sedangkan perbedaan dari segi objek kajian dan konteks pemberitaan. Penelitian Nur Hidayat berfokus pada isu politik, yaitu netralitas media dalam pemberitaan pasca pemilu presiden 2019, sedangkan penelitian tentang framing kenaikan PPN 12% lebih menyoroti isu ekonomi dan kebijakan fiskal pemerintah serta bagaimana media menyampaikan dampak kebijakan tersebut kepada masyarakat.

B. Tinjauan Teoritis

Teori Analisis Framing

a. Robert Entman

Teori analisis framing merupakan salah satu pendekatan penting dalam studi komunikasi massa, khususnya dalam menganalisis bagaimana media membentuk makna terhadap suatu peristiwa. Salah satu tokoh sentral dalam pengembangan teori ini adalah Robert M. Entman. Dalam artikelnya yang

⁶ Nur Hidayat, “Analisis Framing Independensi Pemberitaan Media Online Detik.Com Pasca Pemungutan Suara Pemilihan Presiden 17 April 2019” (Jurnal Al „Adad)

berjudul "*Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm*".⁷ Entman merumuskan konsep framing secara sistematis dan aplikatif untuk memahami konstruksi media dalam penyajian informasi.

Menurut Entman, framing adalah proses seleksi dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas dalam teks komunikasi. Tujuan dari framing adalah untuk membuat elemen-elemen informasi tersebut lebih menonjol sehingga dapat dipahami oleh audiens dalam konteks tertentu. Dengan kata lain, framing membantu menyusun “bingkai” bagaimana suatu isu dipahami, dinilai, dan dibahas dalam ruang publik.

Entman menjelaskan bahwa framing mencakup dua proses utama, yaitu *selection* dan *salience*. *Selection* berarti media memilih sebagian aspek dari suatu realitas dan mengabaikan yang lain. Sedangkan *salience* merujuk pada upaya media untuk membuat aspek yang dipilih itu lebih mencolok atau bermakna dalam wacana publik. Media bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memberi makna terhadap fakta tersebut.

Framing dapat dilakukan dengan menempatkan informasi ke dalam struktur yang mencakup empat fungsi utama, yaitu: mendefinisikan masalah (*define problems*), menilai penyebab (*diagnose causes*), membuat penilaian moral (*make moral judgments*), dan menyarankan penanggulangan (*suggest remedies*). Keempat fungsi ini merupakan kerangka kerja

⁷ Entman, R. M. Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. (*Journal of Communication*, 43(4), 51–58, 2021)

yang digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu isu dikonstruksikan oleh media. Beberapa fungsi utama dari framing yaitu:

- a. Fungsi pertama yaitu mendefinisikan masalah berkaitan dengan bagaimana media menyampaikan suatu peristiwa sebagai sebuah isu penting. Media menentukan aspek mana dari peristiwa yang harus dilihat sebagai masalah, serta sejauh mana tingkat urgensinya dalam wacana publik.
- b. Fungsi kedua adalah menilai penyebab atau *diagnose causes*. Dalam fungsi ini, media mengarahkan perhatian publik terhadap aktor, kondisi, atau kebijakan yang dianggap menjadi penyebab dari permasalahan yang diangkat.
- c. Fungsi ketiga yaitu membuat penilaian moral. Media menyisipkan penilaian terhadap isu yang diberitakan, baik secara eksplisit maupun implisit. Penilaian ini dapat tercermin dalam pilihan kata, kutipan narasumber, maupun sudut pandang yang digunakan. Penilaian moral ini juga berkaitan erat dengan ideologi dan nilai-nilai yang dianut oleh media tersebut.
- d. Fungsi keempat adalah menyarankan penanggulangan atau *suggest remedies*. Dalam fungsi ini, media mengarahkan perhatian publik pada solusi atau tindakan yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan.⁸ Media dapat memberikan dukungan terhadap kebijakan

⁸ McQuail, D. *McQuail's Mass Communication Theory* (6th ed.). (London: Sage Publications, 2022)

tertentu, atau sebaliknya, mengkritik dan menawarkan alternatif lain yang dianggap lebih tepat.⁹

Empat elemen ini tidak selalu muncul secara bersamaan dalam satu berita, namun keberadaan satu atau lebih elemen tersebut sudah cukup untuk menunjukkan bagaimana framing bekerja dalam membentuk wacana. Dalam praktiknya, media seringkali lebih menekankan pada satu atau dua fungsi saja, tergantung pada tujuan pemberitaan dan posisi editorial media tersebut. Entman juga menekankan bahwa framing bersifat ideologis, karena dalam proses pemilihan dan penonjolan informasi, media membawa nilai-nilai tertentu.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa framing bukanlah proses yang netral, melainkan terikat oleh kepentingan politik, ekonomi, maupun budaya dari institusi media itu sendiri.

Teori framing Entman menjadi sangat relevan. Portal berita digital memiliki kecepatan penyampaian informasi yang tinggi dan jangkauan luas, sehingga framing yang dilakukan berpotensi membentuk opini publik secara instan dan massif dan memahami teori framing Entman bukan hanya penting bagi kalangan akademisi, tetapi juga bagi masyarakat luas agar lebih kritis dalam menerima informasi dari media.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Keempat elemen ini bekerja bersama untuk membentuk bagaimana suatu isu dikonstruksidalam media

⁹ McQuail, D. *McQuail's Mass Communication Theory* (6th ed.). (London: Sage Publications, 2022)

¹⁰ Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022)

atau wacana publik, sehingga memengaruhi cara khalayak memahami, mengevaluasi, dan merespons isu tersebut.

Terdapat dua rumusan atau model tentang perangkat framing yang kini kerap digunakan sebagai metode framing untuk melihat upaya media mengemas berita. Pada umumnya, terdapat tiga tindakan yang biasa dilakukan pekerja media massa (setiap orang yang bekerja pada sebuah organisasi media), khususnya oleh para komunikator massa (sejumlah orang dari pekerja media yang bertanggung jawab atas editorial sebuah media), tatkala melakukan konstruksi realitas politik yang berujung pada pembentukan makna atau citra mengenai sebuah kekuatan politik.

Pertama, Pilihan kata dalam suatu teks dideskripsikan bahwa sekalipun melakukan pengutipan langsung (*direct quotation*) media massa tetap terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan pilihan simbol yang digunakan sumber tersebut. Tetapi, manakala media massa membuat ulasan, sebutlah editorial, pilihan kata itu ditentukan sendiri oleh sang komunikator massa.

Kedua, dalam melakukan pembingkaihan (framing) merujuk pada kaidah jurnalistik, peristiwa yang panjang, lebar, rumit, dicoba “disederhanakan” melalui pembingkaihan (framing) fakta-fakta dalam bentuk berita sehingga layak terbit atau layak tayang.

Ketiga, menyediakan ruang atau waktu untuk sebuah peristiwa. Semakin besar tempat yang diberikan semakin besar pula perhatian yang diberikan oleh khalayak khususnya pada peristiwa kenaikan PPN12%.¹¹

b. Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki

Teori framing oleh Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki merupakan salah satu pendekatan analisis media yang menitikberatkan pada bagaimana pesan dikonstruksi melalui struktur bahasa dan elemen-elemen naratif yang digunakan dalam teks berita. Framing dalam konteks ini tidak hanya berarti penyusunan sudut pandang, tetapi juga mencakup cara media menonjolkan aspek tertentu dari realitas dan mengabaikan aspek lainnya untuk membentuk interpretasi publik. Pan dan Kosicki menekankan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga secara aktif membentuk pemahaman audiens melalui struktur berita yang kompleks dan sistematis. Framing adalah proses aktif penyusunan realitas, bukan hanya pemilihan kata atau judul.¹²

Dalam teori mereka, Pan dan Kosicki mengidentifikasi empat struktur utama yang membentuk framing, yaitu struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retorik. Struktur sintaksis merujuk pada cara penulisan berita, seperti bentuk kalimat, penempatan subjek, dan urutan peristiwa. Struktur skrip berkaitan dengan pola naratif umum dalam berita, seperti bagaimana sebuah peristiwa dipahami sebagai masalah, krisis, atau konflik. Struktur tematik mengorganisasi informasi menjadi kerangka

¹¹ David. *Teori Komunikasi Media, Teknologi, dan Masyarakat*. (terj. Teguh Wahyu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021)

¹² Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki, "Framing Analysis: An Approach to News Discourse," *Political Communication*, Vol. 10, No. 1 (1993)

penjelasan yang konsisten, misalnya dengan menekankan sebab- akibat atau tanggung jawab pihak tertentu. Sementara itu, struktur retorik mencakup gaya bahasa, metafora, dan pemilihan diksi yang digunakan untuk memperkuat pesan.¹³

Keempat struktur ini bekerja secara simultan dan saling mendukung untuk membentuk interpretasi terhadap peristiwa yang diberitakan. Dengan kata lain, framing tidak semata tentang isi berita, tetapi tentang bagaimana isi itu dikemas sedemikian rupa agar audiens menerima dan memahami pesan sesuai dengan kehendak media. Misalnya, media dapat membentuk opini masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dengan memilih diksi “kenaikan pajak” dibanding “reformasi fiskal”. Pemilihan diksi seperti ini memiliki dampak psikologis yang signifikan terhadap persepsi audiens terhadap kebijakan tersebut.¹⁴

Lebih lanjut, Pan dan Kosicki memandang framing sebagai konstruksi realitas sosial yang dilakukan oleh media. Mereka menolak anggapan bahwa media bersifat netral dan hanya sebagai saluran informasi. Dalam pandangan mereka, media adalah aktor yang memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik, mengarahkan cara berpikir, dan bahkan mempengaruhi tindakan masyarakat. Oleh karena itu, memahami framing berarti memahami bagaimana media menggunakan bahasa dan struktur naratif untuk membentuk realitas. Hal ini sangat penting dalam konteks demokrasi dan komunikasi

¹³ Robert Entman. *Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S. Foreign Policy*. (Chicago: University of Chicago Press, 2022)

¹⁴ Andrew Rojecki. *The Black Image in the White Mind: Media and Race in America*. (Chicago: University of Chicago Press, 2021)

publik, di mana media memiliki peran vital sebagai sumber informasi masyarakat.¹⁵

Penerapan teori framing Pan dan Kosicki sangat relevan dalam analisis wacana media, terutama untuk mengungkap bias, ideologi tersembunyi, atau kepentingan tertentu yang terkandung dalam pemberitaan. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menelaah bagaimana media membingkai isu-isu sosial, politik, ekonomi, hingga keagamaan. Teori ini membantu pembaca untuk lebih kritis terhadap berita yang dikonsumsi, tidak hanya melihat isi, tetapi juga cara penyajiannya. Oleh karena itu, teori framing Pan dan Kosicki menjadi salah satu alat penting dalam kajian media dan komunikasi massa.¹⁶

C. Tinjauan Konseptual

1. Framing Pemberitaan

Framing pemberitaan adalah proses bagaimana media membentuk dan membingkai suatu realitas sosial melalui pemilihan aspek tertentu dalam pemberitaan. Dalam konteks ini, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menyoroti bagian-bagian tertentu dari suatu peristiwa yang dianggap penting. Proses ini menciptakan sudut pandang tertentu yang memengaruhi bagaimana khalayak memahami isu yang diberitakan. Framing melibatkan pemilihan kata, penekanan tema, penggunaan gambar, dan struktur narasi yang mendukung pesan tertentu. Oleh karena itu, berita yang sama bisa memiliki

¹⁵ Noam Chomsky. *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. (New York: Pantheon Books, 2021)

¹⁶ *Propaganda: The Formation of Men's Attitudes*. (New York: Vintage Books, 2020)

makna berbeda tergantung cara media membingkainya. Dengan kata lain, framing membentuk persepsi publik terhadap isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang tengah berlangsung.

Selain itu, framing pemberitaan dapat digunakan untuk membangun opini publik terhadap tokoh, kebijakan, atau kelompok tertentu. Media sering menggunakan elemen framing seperti pemilihan narasumber, kutipan, dan struktur kalimat untuk membentuk kesan positif atau negatif. Misalnya, dengan menekankan konflik daripada solusi, media bisa menciptakan ketegangan atau ketakutan di masyarakat. Hal ini membuat framing menjadi alat yang sangat kuat dalam memengaruhi kesadaran dan tindakan publik. Oleh sebab itu, para pembaca atau penonton perlu bersikap kritis dalam mengonsumsi informasi dari media massa. Kesadaran terhadap teknik framing dapat membantu masyarakat membedakan antara fakta dan konstruksi opini.

Framing juga berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi dan politik dari lembaga media. Dalam banyak kasus, media cenderung menyajikan berita sesuai dengan ideologi, afiliasi politik, atau target pasar mereka. Hal ini menyebabkan keberpihakan dalam pemberitaan yang tidak selalu mencerminkan kenyataan secara objektif. Framing menjadi jembatan antara informasi dan kekuasaan karena menentukan bagaimana informasi itu dibentuk dan disampaikan kepada publik. Dengan demikian, media bukanlah cermin pasif dari realitas, melainkan aktor aktif dalam menciptakan makna sosial. Pemahaman tentang framing penting dalam konteks literasi media untuk mencegah manipulasi informasi.

Dalam praktik jurnalistik, framing digunakan melalui berbagai struktur, seperti sintaksis (pemilihan kata dan kalimat), tematik (pengaturan ide pokok), retorik (pemilihan gambar atau grafis), dan skrip (alur peristiwa). Struktur-struktur ini diperkenalkan dalam model framing oleh Pan dan Kosicki yang sering digunakan dalam analisis teks media. Dengan analisis struktur ini, kita bisa mengidentifikasi kecenderungan dan agenda tersembunyi dalam suatu pemberitaan. Misalnya, berita yang sering mengulang istilah “kerusuhan” dibanding “aksi protes damai” menunjukkan framing negatif terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, analisis framing dapat digunakan sebagai alat kritis untuk mengevaluasi akurasi dan keadilan informasi dalam media. Ini sangat penting di era digital ketika informasi tersebar cepat dan luas.

Kesimpulannya, framing pemberitaan bukan hanya strategi penyajian informasi, tetapi juga teknik pengaruh sosial dan ideologis. Framing membantu media menyederhanakan informasi kompleks menjadi narasi yang mudah dipahami oleh publik. Namun, framing juga dapat menyebabkan bias, distorsi, atau manipulasi fakta jika tidak disampaikan secara proporsional. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk memahami bagaimana media membentuk realitas. Kesadaran terhadap framing akan mendorong konsumsi informasi yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, literasi media dan analisis framing menjadi bagian penting dari pendidikan komunikasi di era informasi.

2. Kenaikan PPN 12%

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang mulai diberlakukan pada tahun 2025 merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sebelumnya, tarif PPN berada di angka 11% sejak 1 April 2022. Pemerintah menetapkan kenaikan menjadi 12% sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit anggaran. Kebijakan ini dinilai penting dalam memperkuat fondasi fiskal nasional, khususnya pasca-pandemi COVID-19 yang melemahkan banyak sektor ekonomi.¹⁷

Namun, kenaikan PPN ini menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, terutama dari pelaku usaha dan kalangan menengah ke bawah. PPN bersifat regresif, artinya beban pajak relatif lebih berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena mereka membayar pajak dalam jumlah yang sama untuk konsumsi barang dan jasa. Akibatnya, daya beli masyarakat dikhawatirkan menurun karena harga barang kebutuhan pokok dan jasa ikut naik. Hal ini dapat memicu inflasi dan memperlambat laju konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.¹⁸

Dari sudut pandang pengusaha, terutama pelaku UMKM dan sektor informal, kenaikan PPN dinilai dapat mengurangi margin keuntungan dan

¹⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP)*. Jakarta: Kemenkeu

¹⁸ Kompas.com. (2024, Desember 6). *Kenaikan PPN 12% Dikhawatirkan Tekan Daya Beli Masyarakat*

memperburuk kondisi pasar. Banyak pelaku usaha menyatakan kekhawatirannya bahwa konsumen akan menahan belanja atau mencari alternatif barang yang lebih murah. Selain itu, biaya administrasi perpajakan juga berpotensi meningkat, khususnya bagi usaha kecil yang belum memiliki sistem pencatatan yang baik. Disisi lain, perusahaan besar yang sudah terintegrasi dengan sistem perpajakan digital cenderung lebih siap menghadapi kenaikan tarif ini.¹⁹

Pemerintah sendiri berdalih bahwa kebijakan ini merupakan langkah jangka panjang untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, peningkatan tarif PPN diharapkan dapat menyeimbangkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang masih tergolong rendah dibanding negara-negara lain. Selain itu, hasil penerimaan PPN akan digunakan untuk mendanai program-program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.²⁰

Secara keseluruhan, kebijakan kenaikan PPN 12% adalah langkah strategis yang penuh risiko. Diperlukan upaya komunikasi yang transparan dan kebijakan kompensasi seperti bantuan sosial atau insentif bagi sektor rentan agar tidak terjadi guncangan ekonomi. Pemerintah juga perlu mengawasi distribusi harga di pasar agar tidak terjadi spekulasi harga dan penyalahgunaan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam memahami

¹⁹ CNBC Indonesia. (2024, November 30). *PPN Naik Jadi 12%, UMKM Kena Imbas*

²⁰ Badan Kebijakan Fiskal (BKF). (2024). *Strategi Reformasi Pajak Nasional 2025*. Jakarta: Kementerian Keuangan

tujuan serta dampak kebijakan sangat penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang inklusif

3. Portal Berita Detik News.

Detik News adalah salah satu kanal utama dari Detik.com, sebuah portal berita daring terkemuka di Indonesia yang diluncurkan pertama kali pada tahun 1998. Portal ini dikenal luas karena kecepatan dan ketepatannya dalam menyampaikan informasi terkini, terutama terkait isu-isu politik, hukum, ekonomi, sosial, dan peristiwa nasional. Detik News menjadi rujukan banyak masyarakat karena menyajikan berita dengan gaya penulisan langsung, lugas, dan aktual, serta sering melakukan live update terhadap peristiwa penting.

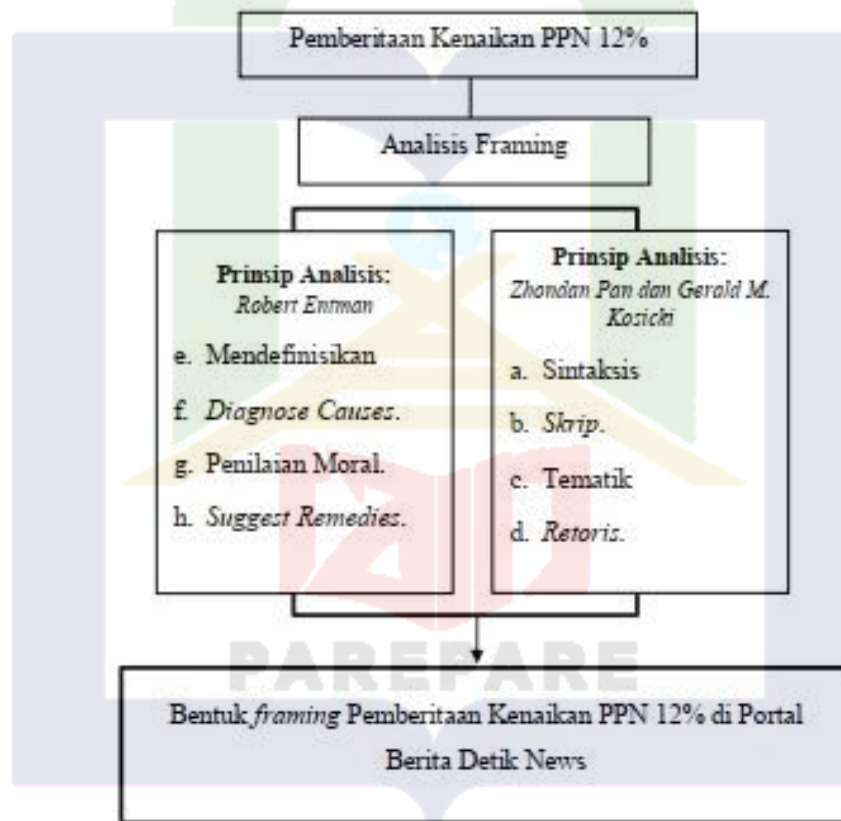
Detik News dikelola oleh PT. Trans Digital Media, yang merupakan bagian dari Transmedia Group milik CT Corp. Sebagai bagian dari grup media besar, Detik News memiliki jaringan jurnalis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, bahkan luar negeri, yang memperkuat daya liput dan akurasi informasi yang disajikan.

Portal ini juga menampilkan berita dari berbagai sudut pandang, baik dari pejabat negara, lembaga pemerintah, akademisi, hingga suara masyarakat, meskipun framing atau sudut pandangnya kerap mencerminkan kebijakan redaksi tertentu. Salah satu ciri khas Detik News adalah seringnya mereka menampilkan berita secara breaking news dan headline yang menarik klik

(clickbait), namun tetap mengedepankan sumber resmidan verifikasi informasi.²¹

D. Kerangka Pikir

Bagan yang dibuat adalah cara berfikir peneliti guna mempermudah pembaca dalam berfikir sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti.²² Berikut kerangka pikir penelitian ini:



²¹ PT. Trans Digital Media. *Profil dan karakteristik Detik News sebagai portal berita digital*. Diakses dari <https://news.detik.com>.

²² Kamaluddin, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), h.70

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang menekankan analisis proses aktivitas pengamatan pada berbagai fakta, data, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dan berfikir berdasarkan kenyataan atau keadaan yang terjadi serta mengkaji berbagai studi dan kumpulan berbagai jenis materi empiris yang terkait dengan konsep penelitian.²³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan analisis teks atau *textual analysis*, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian media yang bertujuan untuk memahami makna-makna yang terkandung dalam teks, baik secara eksplisit maupun implisit. Analisis teks dalam penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana struktur dan isi berita dikonstruksikan, serta bagaimana aspek-aspek tertentu dari realitas sosial ditonjolkan atau diabaikan dalam pemberitaan.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pemberitaan mengenai pemberitaan kenaikan PPN 12% di Portal Berita Detik News. Adapun objek kajian dalam penelitian ini yaitu konten berita merujuk pada teks, judul, gambar, dan narasi dalam berita

²³ Septiawan Santana K., “*Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022),h.87

terkait Pemberitaan Kenaikan PPN 12% di Portal Berita Detik News untuk mengidentifikasi pola framing yang digunakan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini merujuk pada perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Dalam penelitian ini, perhatian utama diberikan pada bagaimana framing pemberitaan kenaikan PPN 12% dikonstruksi oleh portal berita Detik News. Fokus ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media membentuk persepsi publik terhadap kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui teknik pbingkaian berita. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini akan mengacu pada skema framing Entmant, yang mencakup: Menentukan bagaimana isu ini didefinisikan kepada publik. Framing pada tahap ini berfokus pada bagaimana berita menjelaskan kebijakan kenaikan PPN sebagai suatu masalah publik, mengidentifikasi aktor, kondisi, atau kebijakan yang menyebabkan timbulnya masalah, Framing terakhir berfungsi untuk menawarkan solusi atau jalan keluar atas masalah yang diangkat.

D. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu bulan Mei hingga Juni 2025. Selama periode tersebut, peneliti melakukan pengumpulan data, analisis teks, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pemberitaan yang dimuat di portal berita daring *Detik News* mengenai isu kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%.

Adapun tempat penelitian ini bersifat studi kepustakaan (library research) dan studi media daring yang dilakukan secara daring (online). Peneliti mengakses

dan mengumpulkan data melalui portal berita www.detik.com, khususnya pada kanal Detik News yang memuat artikel-artikel berita terkait kebijakan PPN 12%.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berbentuk teks berita.²⁴ Data kualitatif dalam konteks ini berupa narasi, kutipan, serta struktur pemberitaan yang disajikan dalam berita terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di portal berita Detik News.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa teks berita yang secara langsung membahas framing pemberitaan terkait kebijakan kenaikan PPN 12% yang dimuat dalam portal berita Detik News. Data ini dikumpulkan melalui dokumentasi terhadap artikel berita yang relevan dengan topik penelitian. Adapun kriteria berita yang akan dikaji dalam analisis framing yaitu sebagai berikut:

- 1) Berita yang terposting pada Akun resmi berita Detiknews.com dan pada kanal youtube Detik News
- 2) Berita yang terposting sejak 01 November 2024 - 31 Desember 2024

²⁴ Fatchan, A. *Metode penelitian kualitatif*. (Prenada Media., 2023), h.80

3) Jumlah Postingan berita sebanyak 10 Postingan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, yang sudah terdokumentasi, untuk mendukung pemahaman lebih mendalam terhadap topik penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi.²⁵

1. Laporan Penelitian yang terkait dengan framing pemberitaan di media massa, khususnya mengenai Pemberitaan Kenaikan PPN 12% di Portal Berita Detik News.
2. Buku dan Artikel Akademik yang membahas teori framing media, analisis media, serta teori komunikasi dalam konteks pemberitaan kebijakan publik.
3. Dokumentasi Pemerintah atau Laporan Resmi terkait kebijakan Pemberitaan Kenaikan PPN 12% di Portal Berita Detik News yang membantu dalam memberikan konteks terhadap pemberitaan yang dianalisis dan dapat membandingkan bagaimana media framing berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang resmi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah pengumpulan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data

²⁵ Sari, S. *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Praktik*. (Rajawali Pers.2022), h.79

memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁶ Teknik yang digunakan untuk memperoleh data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan memantau langsung pemberitaan mengenai Pemberitaan Kenaikan PPN 12% di Portal Berita Detik News. Peneliti akan mengamati cara berita tersebut disusun, bahasa yang digunakan, serta elemen-elemen framing seperti penonjolan isu penekanan pada pihak tertentu dan bagaimana narasi dikembangkan dalam pemberitaan. Observasi bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana media membingkai isu Pemberitaan Kenaikan PPN 12% di Portal Berita Detik News.

2. Analisis Teks (Text Analysis)

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik analisis teks yang digunakan untuk mengkaji secara sistematis dan objektif teks berita mengenai kenaikan PPN 12% di Portal Berita Detik News. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kecenderungan dalam pemberitaan. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis struktur berita, pilih kata, narasi, serta representasi pihak-pihak yang terlibat. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana media membangun wacana terkait kenaikan PPN 12% dan apakah terdapat kecenderungan tertentu dalam penyajian informasi.

²⁶ Nurhadi. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Ar-Ruzz Media, 2023), h.67

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan artikel-artikel atau berita terkait Pemberitaan Kenaikan PPN 12% di Portal Berita Detik News. Dokumen- dokumen akan dianalisis untuk melihat bagaimana elemen- elemen framing seperti kata-kata, visual, atau kutipan digunakan dalam penyajian berita.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penelaahan, pengelompokan, penyusunan secara sistematis, penafsiran, dan verifikasi data agar fenomena yang diteliti memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi dengan pendekatan model Entman dalam framing pemberitaan kenaikan PPN 12% di Portal Berita Detik News.²⁷ Adapun prinsip-prinsip analisis berdasarkan model Entman adalah sebagai berikut:

a. Mendefinisikan Masalah (*Define Problems*)

Dalam pemberitaan kenaikan PPN 12% di portal berita *Detik News*, media memiliki peran dalam menentukan bagaimana isu ini didefinisikan kepada publik. Framing pada tahap ini berfokus pada bagaimana berita menjelaskan kebijakan kenaikan PPN sebagai suatu masalah public apakah kebijakan ini dipandang sebagai langkah ekonomi yang diperlukan untuk stabilitas fiskal negara, atau justru dianggap sebagai beban tambahan bagi masyarakat, terutama kelas menengah dan bawah.

²⁷ Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Remaja Rosdakarya.2022),h.59

b. Mendiagnosis Penyebab (Diagnose Causes)

Tahap ini mengacu pada bagaimana media mengidentifikasi aktor, kondisi, atau kebijakan yang menyebabkan timbulnya masalah. Dalam pemberitaan tentang kenaikan PPN, media dapat menunjukkan bahwa penyebabnya adalah defisit anggaran negara, kebutuhan akan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, atau desakan untuk memperluas basis pajak nasional.

c. Penilaian Moral (Make Moral Judgments)

Pada elemen ini, media melakukan proses pemberian nilai terhadap kebijakan atau pelaku kebijakan, apakah dianggap positif, negatif, adil, atau tidak adil. Dalam konteks kenaikan PPN, *Detik News* bisa melakukan framing moral dengan menyisipkan kutipan dari tokoh masyarakat, ekonom, atau politisi yang menilai kebijakan ini dari sudut etika dan keadilan sosial.

d. Menyarankan Solusi (Suggest Remedies)

Framing terakhir berfungsi untuk menawarkan solusi atau jalan keluar atas masalah yang diangkat. Dalam pemberitaan kenaikan PPN, media bisa memberikan ruang bagi solusi alternatif, seperti: memperluas basis pajak tanpa menaikkan tarif, memperbaiki efisiensi belanja negara, atau memberi subsidi kompensasi untuk masyarakat terdampak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. *Framing Pemberitaan Kenaikan PPN 12% di Portal Berita Detik News*

Berikut deskripsi 10 berita yang dianalisis dalam penelitian ini: Tabel 4.1
Konten Berita Kenaikan PPN 12%

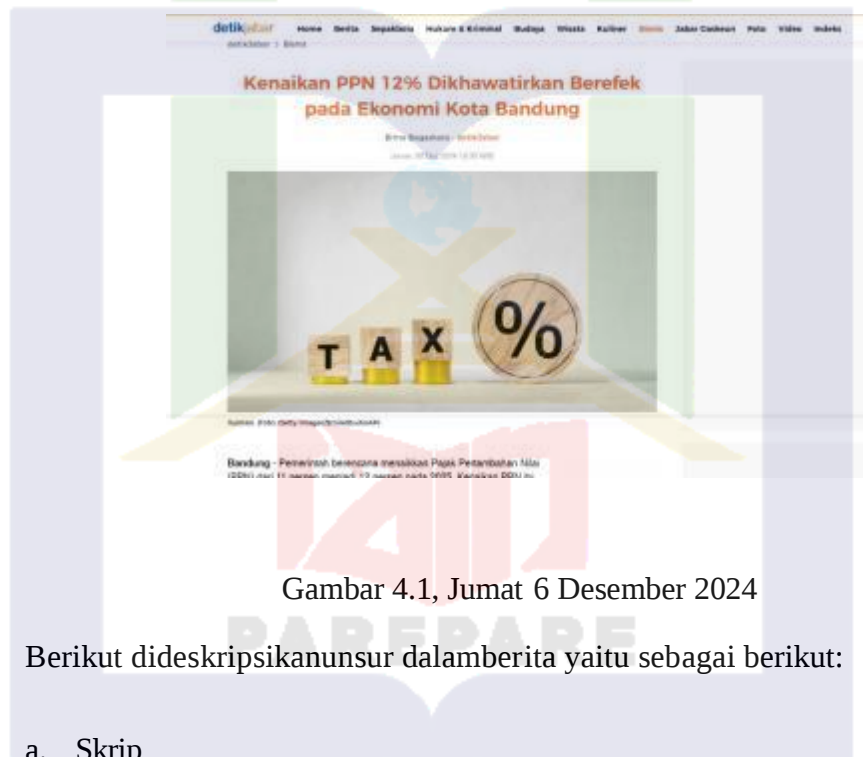
No	Judul	Tanggal Terbit
1	Kenaikan PPN 12% Dikhawatirkan Berefek pada Ekonomi Kota Bandung	Jumat, 6 Desember 2024
2	PPN 12% Tetap Berlaku di 2025	Rabu, 4 Desember 2024
3	Mencuat Penolakan PPN 12% dari Sana Sini	Jumat, 20 Desember 2024
4	PPN 12% Jadi Cumauntuk Barang Mewah, Harga Barang Lain Terlanjur Naik	Sabtu, 21 Desember 2024
5	Kabar Terbaru PPN 12% dari Diskusi Prabowo dan DPR	Jumat, 6 Desember 2024
6	Jokowi soal PPN 12%: Sudah Diputuskan DPR, Pemerintah Harus Jalankan	Sabtu, 28 Desember 2024
7	Puan Ungkap Ada Kekhawatiran PPN 12% Perburuk Kondisi Kelas Menengah	Kamis, 19 Desember 2024
8	Saat Elite Saling Tuding Soal PPN 12%	Kamis, 19 Desember 2024
9	PPN 12% Berlaku 1 Januari 2025, Sri Mulyani Sebut Masih Rendah	Jumat, 27 Desember 2024

10	PPN 12% Hanya Barang Mewah, PAN: Keberpihakan Prabowo ke Rakyat Tak Diragukan	Rabu, 1 Januari 2025
----	---	----------------------

Sumber : Data Primer, 2025

- a. Framing Pemerintah pusat aktor kebijakan utama dan Pemerintah daerah penerima dampak

“Kenaikan PPN 12% Dikhawatirkan Berefek pada Ekonomi Kota Bandung”



Gambar 4.1, Jumat 6 Desember 2024

Berikut dideskripsikan unsur dalam berita yaitu sebagai berikut:

- a. Skrip

Berikut deskripsi skrip dalam berita tersebut:

Bandung - Pemerintah berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025. Kenaikan PPN itu dikhawatirkan akan mempengaruhi perekonomian di

Kota Bandung. Seperti diketahui, Kota Bandung mengandalkan sektor jasa dan pariwisata. Jika PPN naik 12 persen tahun depan, dikhawatirkan akan membuat harga-harga seperti hotel melambung tinggi.

Pj Wali Kota Bandung, A Koswara menyebut, kenaikan PPN dipastikan akan memberi dampak pada ekonomi Kota Bandung. Namun Koswara menuturkan, hingga saat ini Pemkot Bandung belum menerima kabar pasti soal rencana kenaikan tersebut

"Ya pasti akan pengaruh, kalau pajak-pajak pasti pengaruh. Tapi belum ada petunjuk teknisnya, kan belum ada," kata Koswara, Jumat (6/12/2024). Meski begitu, Koswara mengungkapkan jika pemerintah pusat telah memutuskan menaikkan PPN jadi 12 persen, Kota Bandung akan mengikuti aturan itu meski harus menghadapikonsekuensinya.

"Kalau PPN itu adalah pajak pusat bukan pajak daerah, kalau pusat menerapkan itu ya konsekuensinya pasti ada ke daerah," ujarnya. Kabar terbaru, pemerintah berencana hanya mengenakan PPN 12 persen untuk barang mewah. Selanjutnya, barang pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat tidak akan dikenakan PPN 12%. Barang-barang tersebut diusulkan masih dikenai PPN 11%.

"Yang pertama, untuk PPN 12% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah jadi secara selektif," ujar Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dikutip dari detikNews.

"Kemudian yang kedua, barang-barang pokok dan berkaitan dengan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat masih tetap akan diperlakukan pajak yang sekarang yaitu 11%," jelasnya.

b. Tematik

Berikut deskripsi tematik pada berita tersebut:

Tema Utama 12%	Rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi oleh pemerintah pusat tahun 2025
-------------------	---

Sub tema	1. Kekhawatiran dampak kenaikan PPN terhadap ekonomi Kota Bandung. 2. Respons dan pernyataan Pj Wali Kota Bandung mengenai kebijakan tersebut. 3. Penjelasan terbaru dari DPR mengenai selektivitas penerapan PPN (barang mewah vs barang pokok)
----------	--

c. Retoris

Berikut deskripsi retoris pada berita tersebut:

Kutipan Langsung	Digunakan untuk memperkuat berita dengan pendapat otoritas, seperti Pj Wali Kota Bandung dan Wakil Ketua DPR. Ini memberikan kesan objektif dan terpercaya
---------------------	--

Penyampaian Kekawatiran	Ungkapan seperti "dikhawatirkan akan mempengaruhi perekonomian" membangun daya tarik emosional terhadap pembaca agar turut memperhatikan isu ini
----------------------------	--

Kalimat Klausal untuk	Seperti "jika PPN naik... maka..." digunakan membangun logika sebab-akibat dalam menjelaskan dampak kebijakan
-----------------------	---

d. Sintaksis

Berikut deskripsi sintaksis pada berita tersebut:

Kalimat Deklaratif	"Pemerintah berencana menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025."
Kalimat Majemuk	"Jika PPN naik 12 persentahun depan, dikhawatirkan akan membuat harga-harga seperti hotel melambung tinggi."

Berdasarkan hasil identifikasi unsur berita tersebut maka deskripsi framing dalam berita tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Define News

Berita ini mendefinisikan isu utama sebagai rencana pemerintah pusat menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025. Fokus pemberitaan diarahkan pada potensi dampak ekonomi khususnya bagi Kota Bandung yang bergantung pada sektor jasa dan pariwisata.

- 1) Isu disorot melalui sudut pandang lokal (Bandung), memperlihatkan bagaimana kebijakan nasional bisa memengaruhi kehidupan ekonomi di daerah.
- 2) Penekanan juga diberikan pada potensi kenaikan harga barang/jasa, seperti hotel

b. *Diagnose Causes.*

Penyebab permasalahan yang diangkat dalam berita ini adalah:

- 1) Kebijakan pemerintah pusat dalam menaikkan tarif PPN sebagai bagian dari strategi fiskal nasional
- 2) Ketidakjelasan petunjuk teknis atau rincian implementasi kebijakan, yang membuat daerah seperti Kota Bandung belum bisa mengambil langkah konkret.

c. *Penilaian Moral.*

Berita menyampaikan penilaian moral secara implisit, yaitu:

- 1) Ada nada kekhawatiran terhadap dampak kebijakan yang bisa merugikan masyarakat, khususnya dalam sektor pariwisata dan jasa
- 2) Pemerintah daerah, melalui Pj Wali Kota Bandung, digambarkan realistis dan patuh terhadap pusat, meskipun menyadari potensi konsekuensi negatif dari kebijakan tersebut
- 3) DPR ditampilkan berusaha menenangkan publik dengan menyatakan bahwa barang pokok tidak akan dikenai tarif PPN 12%, yang menggambarkan upaya keadilan sosial dalam kebijakan fiskal.

d. *Suggest Remedies*

Solusi atau respon yang disarankan dalam berita ini adalah:

- 1.) Kota Bandung akan mengikuti kebijakan pusat, meskipun belum menerima petunjuk teknisnya. Ini menunjukkan kepatuhan administratif sebagai satu-satunya opsi saat ini
2. Dari sisi DPR, solusi ditawarkan dalam bentuk pembatasan kenaikan PPN

hanya untuk barang mewah, sementara barang kebutuhan pokok tetap pada tarif 11%, sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat bawah. Kesimpulan framing dalam penelitian ini yaitu:

Framing berita ini menempatkan pemerintah pusat sebagai aktor kebijakan utama sementara pemerintah daerah sebagai penerima dampak. Nada umum berita bersifat kritis hati-hati dengan sorotan pada konsekuensi ekonomi dan perlunya kejelasan teknis serta perlindungan terhadap masyarakat dari dampak kebijakan fiskal.

- b. Framing ketegangan antara kepentingan fiskal pemerintah dan daya tahan ekonomi masyarakat



Gambar 4.2 Detik News, Rabu, 04 Desember 2024

Berikut dideskripsikan unsur dalam berita yaitu sebagai berikut:

- e. Skrip

Berikut deskripsi skrip dalam berita tersebut:

Jakarta - Pemerintah tetap menerapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada Januari 2025. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Parjiono mengatakan kebijakan tersebut bakal mengecualikan beberapa kelompok demi menjaga daya beli. Beberapa di antaranya kelompok masyarakat miskin, kesehatan, hingga pendidikan.

"Jadi kita masih dalam proses ke sana, artinya akan berlanjut. Tapi kalau kita lihat dari sisi, khususnya menjaga daya beli masyarakat, di situ kan pengecualiannya sudah jelas: untuk masyarakat miskin, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya di sana," katanya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Selasa (3/12/2024). Parjiono juga menyebut keberadaan subsidi bakal menjadi jaring pengaman. Terkait insentif perpajakan, kata dia, hal itu justru lebih banyak dinikmati kelas menengah atas.

"Kan daya beli jadi salah satu prioritas, kita perkuat juga subsidi jaring pengaman. Kalau kita lihat juga insentif perpajakan, kan yang lebih banyak menikmati kan kelas menengah atas," tambah dia. Sementara itu, saat ditanya wartawan terkait PPN 12% yang kabarnya akan tetap diberlakukan, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak banyak bicara. Dia hanya menjawab perlu ditanyakan langsung kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Nanti Pak Menko aja," ucapnya singkat usai rapat bersama sejumlah menteri di Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa

(3/12/2024). Di sisi lain, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan belum ada pembahasanterkait penundaan kenaikan PPN tersebut. "Belum, belum dibahas," ucap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (28/11/2024) dilansir dari detikfinance.

PPN Naik, Harga Kamar Hotel Juga Naik Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyebut kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% akan berdampak pada tarif kamar hotel dan harga yang harus dibayarkan konsumen restoran.

Karena itu, dia meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan ini agar tidak kontra produktif terhadap pemulihan ekonomi. Kenaikan PPN justru berpotensi melemahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. PPN Naik, Tiket Pesawat Juga Naik Presiden Direktur Lion Group, Capt. Daniel Putut Kuncoro Adi, di kesempatan terpisah menyebut kenaikan PPN 12% tentu mempengaruhi daya beli di industri penerbangan. Kendati kenaikan hanya dilakukan satu persen, tetapi hal itu sudah sangat memengaruhi daya beli masyarakat Indonesia. "Dengan 1 persen saja berarti sudah mempengaruhi, dari 11 persen jadi tambah 1 persen, daya beli masyarakat sendiri apa sudah sampai ke situ. Tapi namanya kebijakan pemerintah sekali lagi kita sampaikan kita harus comply," dia menambahkan.

Saksikan pembahasan lengkap hanya di program detikPagi edisi Rabu (04/12/2024). Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com.

f. Tematik

Berikut deskripsitematik pada berita tersebut:

Tema Utama	Kebijakan pemerintah terkait kenaikan PPN menjadi 12% yang mulai berlaku Januari 2025 dan dampaknya terhadap masyarakat sertasektor-sektorekonomitertentu
Sub tema	a. Pengecualian PPN bagikelompok rentan seperti masyarakat miskin, sektorkesehatan, dan pendidikan. b. Peran subsidi sebagaijaring pengaman sosial. c. Respons pejabat pemerintah, termasuk sikap diam atau diplomatis dari Sri Mulyani. d. Dampak kenaikan PPN terhadap sektor pariwisata, seperti hotel dan restoran. e. Dampak pada industripenerbangan dan kekhawatiran penurunan daya belimasyarakat

g. Retoris

Berikut deskripsiretoris pada berita tersebut:

Kutipan langsung dari pejabat	(Parjiono, Sri Mulyani, Airlangga, Maulana Yusran, Capt. Daniel Putut) untuk memberikan kesan objektif, aktual, dan kredibel
Pertanyaan retorik implisit	" <i>Daya beli masyarakat sendiri apakah sudah sampai ke situ?</i> " menunjukkan keraguan terhadap kesiapan masyarakat menerima kebijakan ini.
Kontras atau pertentangan	Antara niat kebijakan dan dampak nyata: pemerintah berniat menjaga daya beli, tetapi sektor pariwisata dan transportasi justru terdampak
h. Sintaksis Berikut deskripsi sintaksis pada berita tersebut:	
Struktur kalimat kompleks	Parjiono mengatakan kebijakan tersebut mengecualikan beberapa kelompok demi menjaga daya beli."
Kalimat langsung dan tidak langsung	digunakan untuk mengutip narasumber secara akurat, menambah bobot informasi, "karena itu", "tapi", "sementara itu", "jika", yang menghubungkan fakta, sebab-akibat, dan waktu peristiwa

Berdasarkan hasil identifikasi unsur berita tersebut maka deskripsi framing dalam berita tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Define News

Masalah yang diangkat dalam berita ini adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai Januari 2025. Isu difokuskan pada dampak kebijakan ini terhadap daya beli masyarakat serta sektor-sektor yang sensitif terhadap konsumsi publik seperti pariwisata dan transportasi.

b. *Diagnose Causes.*

Penyebab utama dari kebijakan ini adalah implementasi UU HPP No. 7/2021 sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, berita juga menunjukkan ketidaksiapan ekonomi masyarakat terutama dari sudut pandang pelaku industri, sebagai penyebab potensi negatif dari kebijakan tersebut.

c. Penilaian Moral.

Penilaian moral dalam berita ini bersifat ambivalen:

1. Dari sisi pemerintah, kebijakan ini dianggap wajar dan perlu karena disertai pengecualian bagi kelompok rentan serta penyediaan subsidi.
2. Namun dari perspektif pelaku usaha dan masyarakat kebijakan ini dinilai bisa melemahkan pemulihan ekonomi dan menurunkan daya beli, terutama di sektor pariwisata dan penerbangan.

d. *Suggest Remedies*

Berita ini menyiratkan beberapa solusi, seperti:

1. Pengecualian PPN untuk sektor-sektor esensial (kesehatan, pendidikan, masyarakat miskin)
2. Subsidi dan insentif sebagai jaring pengaman

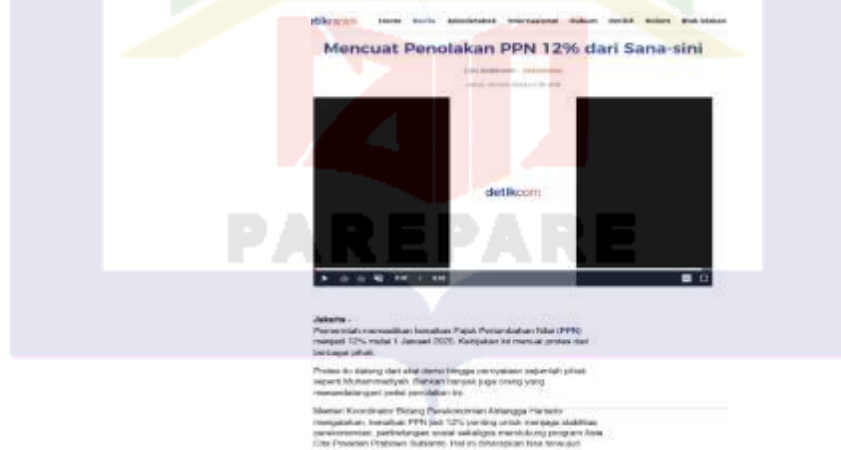
3. Permintaan agar pemerintah mempertimbangkan ulang atau menyesuaikan penerapan kebijakan agar tidak kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Kesimpulan framing dalam penelitian ini yaitu:

Framing berita ini mendeskripsikan ketegangan antara kepentingan fiskal pemerintah dan daya tahan ekonomi masyarakat. Meskipun pemerintah mencoba menampilkan kebijakan ini sebagai langkah terukur dan adil melalui pengecualian dan subsidi, media juga menghadirkan kritik dari pelaku usaha yang meragukan kesiapan masyarakat dan khawatir akan dampak negatif terhadap sektor produktif. Dengan demikian, framing berita cenderung berimbang tetapi lebih condong pada narasi kehati-hatian dan evaluasi ulang kebijakan.

- c. Framing kebijakan kenaikan PPN 12% sebagai kebijakan kontroversial

“Mencuat Penolakan PPN 12% dari Sana-sini”



Gambar 4.3 Jumat, 20 Desember 2024

Berikut dideskripsikan unsur dalam berita yaitu sebagai berikut:

a. Skrip

Berikut deskripsi skrip dalam berita tersebut:

Jakarta

- Pemerintah memastikan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini menuai protes dari berbagai pihak. Protes itu datang dari aksi demo hingga pernyataan sejumlah pihak seperti Muhammadiyah. Bahkan banyak juga orang yang menandatangani petisi penolakan ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kenaikan PPN jadi 12% penting untuk menjaga stabilitas perekonomian, perlindungan sosial sekaligus mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diharapkan bisa terwujud melalui peningkatan pendapatan negara.

"Peningkatan pendapatan negara di sektor pajak itu penting untuk mendorong program Asta Cita dan prioritas Pak Presiden baik untuk kedaulatan dan resiliensi di bidang pangan dan kedaulatan energi," kata Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi, di kantornya, Jakarta, Senin (16/12).

"Di samping itu juga tentu penting untuk berbagai program infrastruktur pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan juga program terkait dengan makanan bergizi," sambungnya.

Muncul petisi meminta pemerintah segera membatalkan kenaikan PPN. Petisi ini sudah ditandatangani oleh 95 ribu orang lebih. Dilihat detikcom, Kamis (19/12/2024), petisi ini dimulai

oleh akun atas nama 'Bareng Warga'. Petisi yang diberi judul 'Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!' itu dimulai sejak 19 November 2024. Pukul 09.16 WIB petisi ini sudah ditandatangani 95.284 orang. Petisi ini mempetisi Presiden Republik Indonesia.

Bareng Warga mengatakan petisi ini dibuat karena adanya kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% per 1 Januari 2025. Menurutnya, kenaikan ini membuat masyarakat semakin kesulitan karena harga akan naik. "Rencana menaikkan kembali PPN merupakan kebijakan yang akan memperdalam kesulitan masyarakat. Sebab harga berbagai jenis barang kebutuhan, seperti sabun mandi hingga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan naik. Padahal keadaan ekonomi masyarakat belum juga hinggap di posisi yang baik," ujar Bareng Warga dalam petisi tersebut Bareng Warga mencontohkan biaya hidup di Jakarta yang tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat. Dia juga mengatakan kenaikan PPN ini bisa membuat daya beli masyarakat semakin merosot. "Naiknya PPN yang juga akan membuat harga barang ikut naik sangat mempengaruhi daya beli. Kita tentu sudah pasti ingat, sejak bulan Mei 2024 daya beli masyarakat terus merosot. Kalau PPN terus dipaksakan naik, niscaya daya beli bukan lagi merosot, melainkan terjun bebas," katanya. "Atas dasar itu, rasa-rasanya Pemerintah perlu membatalkan kenaikan PPN yang tercantum dalam UU HPP. Sebelum luka masyarakat kian menganga. Sebelum tunggakan pinjaman online membesar dan menyebar ke mana-mana," imbuhnya.

b. Tematik

Berikut deskripsitematik pada berita tersebut:

Tema Utama	Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025
Subtema	1. Alasan pemerintah menaikkan PPN, yakni untuk mendukung program prioritas nasional seperti Asta Cita, ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan perlindungan sosial. 2. Penolakan masyarakat melalui aksi demo, pernyataan organisasi seperti Muhammadiyah, dan petisi online. 3. Dampak kenaikan PPN terhadap daya beli dan biaya hidup masyarakat. 4. Seruan agar pemerintah membatalkan kebijakan tersebut

c. Retoris

Berikut deskripsiretoris pada berita tersebut:

Gaya Retoris Yang	Penggunaan kutipan langsung dari petisi seperti “daya
Kontras	beli bukan lagi merosot, melainkan terjun bebas” menekankan kekhawatiran masyarakat secara dramatis
Dan	Kalimat seperti “sebelum luka masyarakat kian menganga” memperkuat retorika penderitaan rakyat
Emosional	Ungkapan retorik dalam petisi menciptakan kesan

bahwa kebijakan ini diambil tanpa empati terhadap
realita ekonomi masyarakat

d. Sintaksis

Berikut deskripsi sintaksis pada berita tersebut:

Beragam dan kompleks	"Peningkatan pendapatan negara di sektor pajak itu penting untuk mendorong program Asta Cita..."
	"Petisi ini sudah ditandatangani oleh 95.284 orang."

Berdasarkan hasil identifikasi unsur berita tersebut maka deskripsi
framing dalam berita tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Define News

Berita ini mengangkat isu kebijakan pemerintah yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Isu ini diposisikan sebagai sumber ketegangan antara pemerintah yang mendorong pendapatan negara dan masyarakat yang merasa terbebani secara ekonomi.

b. *Diagnose Causes.*

Penyebab utama dari ketegangan ini diidentifikasi yaitu:

- 1) Sebagai kebijakan fiskal pemerintah yang berorientasi pada peningkatan penerimaan negara demi pembiayaan program nasional seperti Asta Cita. Namun, langkah ini dianggap kurang mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat yang belum stabil pascapandemi

c. Penilaian Moral.

Berita menyoroti dampak moral dan sosial dari kebijakan tersebut, dengan menyiratkan bahwa:

- 1). Menaikkan PPN dalam kondisi ekonomi yang belum pulih adalah tidak empatik
- 2). Berisiko menambah penderitaan rakyat. Ungkapan emosional dalam petisi dan kutipan masyarakat menggambarkan kebijakan ini sebagai bentuk ketidakadilan sosial.

d. *Suggest Remedies*

Berita ini menyiratkan beberapa solusi, seperti:

1. Pemerintah membatalkan atau menunda kenaikan PPN.
2. Melakukan evaluasi dampak ekonomi terhadap rakyat kecil dan kelas menengah.
3. Menyalurkan kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan, seperti mengalihkan beban pajak ke sektor barang mewah.
4. Memperkuat komunikasi publik untuk membangun kepercayaan dan pemahaman atas kebijakan.

Kesimpulan framing dalam penelitian ini yaitu:

Framing berita ini mendeskripsikan kebijakan kenaikan PPN 12% sebagai kebijakan ekonomi yang kontroversial di mana pemerintah dinarasikan sebagai pihak yang fokus pada stabilitas fiskal dan pembangunan, sementara masyarakat digambarkan sebagai pihak yang rentan dan berpotensi menjadi korban dari kebijakan tersebut. Berita memberikan ruang

yang signifikan pada suara publik dan memperlihatkan kesenjangan persepsi antara pengambil kebijakan dan realitas rakyat.

d. Framing pemerintah yang memberikan kepastian hukum

“PPN 12% Jadi Cuma untuk Barang Mewah, Harga Barang Lain Terlanjur Naik”



Gambar 4.4 21 Desember 2024

Berikut dideskripsikan unsur dalam berita yaitu sebagai berikut:

a. Skrip

Berikut deskripsi skrip dalam berita tersebut:

Jakarta

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan tarif pajak penambahan nilai (PPN) jadi 12% hanya berlaku untuk barang mewah. Sehingga untuk produk barang atau jasa lainnya tidak mengalami perubahan dan tetap dikenakan tarif sebelumnya.

Artinya, jika suatu barang sebelumnya membayar PPN 11%, maka per 1 Januari 2025 dan seterusnya tetap membayar PPN 11%. Begitu juga dengan barang yang dibebaskan PPN atau PPN 0% tetap akan dibebaskan membayar PPN.

"Seluruh barang dan jasa yang selama ini (bayar PPN) 11% tetap 11%, tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan jasa yang selama ini tetap 11%. Barang dan jasa yang selama ini mendapatkan pengecualian yaitu PPN nya 0% yaitu tidak sama sekali membayar PPN," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (31/12/2024). Pengamat pajak dari Center for Indonesia Tax Analysis (CITA), Fajry Akbar menyayangkan pengumuman ini baru disampaikan satu hari sebelum kebijakan PPN 12% resmi diterapkan. Sebab saat ini banyak pihak termasuk para pengusaha di sektor penjualan dan produsen kebanyakan sudah terlanjur menaikkan Harga barang sebagai bentuk antisipasi perubahan tarif. "Secara keseluruhan saya mengapresiasi pemerintah yang mau mendengarkan suara rakyat. Akan tetapi, kita sangat sayang waktu pengumumannya yang sangat mepet sekali," kata Fajry saat dihubungi detikcom, Senin (1/1/2025).

"Harga-harga sudah naik terlebih dahulu. Karena tarif PPN sudah di-setting jauh-jauh hari. Lalu, harga juga sudah naik karena penjual, produsen, atau pedagang melakukan antisipasi kenaikan tarif PPN," terangnya lagi. Akibatnya, menurut Fajry banyak pihak harus mengubah kembali harga produk barang atau jasa yang ditawarkan dengan skema tarif PPN semula yakni 11%. Namun tentu saja penyesuaian harga ini membutuhkan waktu. "(Harga produk dengan PPN 12%) sudah di set jauh-jauh hari. Yang setting pasti sedang liburan dan butuh waktu (untuk menyesuaikan kembali harga barang dan jasa)," jelasnya.

Terlepas dari itu, penerapan aturan PPN 12% untuk barang mewah ini menurutnya tidak akan memberikan dampak besar terhadap masyarakat pada umumnya. Kecuali harga barang-barang mewah yang masuk dalam kategori yang sudah ditentukan akan semakin mahal. "Dampak ke masyarakat akan sangat terbatas sekali. Dampaknya terhadap penerimaan negara juga akan sangat terbatas. Kurang lebih sama dengan estimasi pemerintah," papar Fajry.

b. Tematik

Berikut deskripsi tematik pada berita tersebut:

Tema Utama	Klarifikasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang hanya berlaku untuk barang mewah mulai 1 Januari 2025
Subtema	1. Pemerintah (Kemenkeu) menegaskan tidak ada kenaikan tarif PPN untuk barang umum dan jasa. 2. Dampak terhadap pelaku usaha akibat pengumuman yang terlalu mepet. 3. Penyesuaian harga akibat asumsi keliru dari pelaku pasar. 4. Dampak kebijakan terhadap masyarakat dan penerimaan negara

c. Retoris

Berikut deskripsi retorik pada berita tersebut:

retorika penekanan	"Seluruh barang dan jasa yang selama ini (bayar PPN) 11% tetap 11%, tidak ada kenaikan..."
	Kritik konstruktif dari pengamat pajak
	"Kita sangat sayangkan waktu pengumumannya yang sangat mepet sekali..."

d. Sintaksis

Berikut deskripsi sintaksis pada berita tersebut:

Kalimat Kompleks lalu	"Karena tarif PPN sudah di-setting jauh-jauh hari, harga juga sudah naik..."
	Pola subjek-predikat-objek (SPO) konsisten dan lugas, sehingga berita mudah dipahami oleh khalayak umum

Berdasarkan hasil identifikasi unsur berita tersebut maka deskripsi framing dalam berita tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Define News

Berita ini menginformasikan bahwa pemerintah melalui Menteri Keuangan menyatakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% hanya berlaku untuk barang mewah, sementara barang dan jasa umum tetap dikenakan tarif 11% atau 0%. Hal ini bertujuan meredam kekhawatiran publik dan meluruskan kesalah pahaman.

b. *Diagnose Causes.*

Penyebab utama dari ketegangan ini diidentifikasi sebagai:

1. Minimnya komunikasi publik atau keterlambatan pengumuman resmi dari pemerintah mengenai detail kebijakan.
2. Ketidaksiapan pelaku usaha, yang mengiratarif PPN 12% berlaku luas dan menaikkan harga lebih dulu.
3. Salah persepsi masyarakat yang mengira semua barang akan mengalami kenaikan PPN.

c. Penilaian Moral.

Berita menunjukkan bahwa:

1. Pemerintah dianggap responsif, karena akhirnya memberiklarifikasi menjelang hari pelaksanaan.
2. Namun, juga dikritik secara etis, terutama karena pengumuman dilakukan terlalu mendekati hari H, sehingga dianggap kurang menghargai kesiapan pelaku ekonomi.
4. Pemerintah dinilai telah mendengarkan aspirasi masyarakat, tetapi tetap perlu membenahi cara komunikasi kebijakan.

d. *Suggest Remedies*

Berita ini menyiratkan beberapa solusi, seperti:

1. Pemerintah perlu mengumumkan kebijakan fiskal lebih awal dan jelas, agar tidak menimbulkan kepanikan atau reaksi prematur dari pelaku usaha
2. Perlu adanya edukasi publik tentang kebijakan pajak agar masyarakat tidak mudah salahpahaman

Kesimpulan framing dalam penelitian ini yaitu:

Framing berita ini mendeskripsikan pemerintah sebagai pihak yang akhirnya memberi kepastian hukum dan arah kebijakan secara tegas, meskipun disertai kritik atas keterlambatan informasi, Narasi dibentuk untuk menunjukkan bahwa kebijakan tidak seburuk yang dikhawatirkan publik, tetapi membutuhkan peningkatan dalam sisi komunikasi, transparansi, dan koordinasi lintas sektor.

e. Framing pemerintah dan DPR sebagai responsif kekhawatiran publik

“Kabar Terbaru PPN 12% dari Diskusi Prabowo dan DPR”



Gambar 4.5 06 Desember 2024

Berikut dideskripsikan unsur dalam berita yaitu sebagai berikut: a. Skrip

Berikut deskripsi skrip dalam berita tersebut:

Jakarta

Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan menyetujui penerapan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% secara selektif, hanya untuk barang-barang mewah, sebagaimana disampaikan

oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai diskusi bersama Prabowo dan jajaran DPR. "Presiden Prabowo menyambut baik masukan kami agar kenaikan PPN 12% tidak berlaku bagi barang kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan pendidikan. Beliau berjanji akan mengkaji dan mendiskusikannya dengan Menteri Keuangan," ujar Dasco kepada awak media, Jumat (6/12/2024).

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menambahkan bahwa PPN 12% tetap diberlakukan sesuai jadwal pada 1 Januari 2025, namun dengan penerapan yang terbatas hanya pada barang-barang tertentu yang dikategorikan sebagaimewah.

“Penerapan selektif ini bertujuan untuk melindungi daya belimasyarakat kelas bawahdan menengah, terutama disektorkebutuhandasar,” kata Misbakhun. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto turut memastikan bahwa komoditas seperti sembako, layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi tidak akan terdampakkebijakan ini.

b. Tematik

Berikut deskripsitematik pada berita tersebut:

Temautama	Kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% berlakupada 1 Januari 2025
Subtema PPN	1. Kesepakatan Presiden Prabowo dan DPR agar 12% hanya berlaku secara selektif.

2. Pengecualian terhadap barang kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
3. Upaya merespons kekhawatiran publik terhadap dampak kebijakan fiskal terhadap daya beli masyarakat.

c. Retoris

Berikut deskripsi retorika pada berita tersebut:

Persuasif

Ada penekanan bahwa pemerintah dan DPR mendengar aspirasi masyarakat, serta memastikan perlindungan bagi masyarakat kecil

Berita menggunakan pernyataan langsung dari tokoh-tokoh pemerintah seperti Sufmi Dasco Ahmad, Mukhamad

Misbakhun, dan Airlangga Hartarto

d. Sintaksis

Berikut deskripsi sintaksis pada berita tersebut:

Dominan kalimat langsung (kutipan)

Berita menyusun informasi dari pernyataan tokoh secara berurutan untuk membentuk argumen koheren bahwa kebijakan bersifat selektif dan pro-rakyat

dankali mat majemu k.

Kalimat kompleks digunakan untuk menjelaskan syarat dan pengecualian terhadap kebijakan PPN

Berdasarkan hasil identifikasi unsur berita tersebut maka deskripsi framing dalam berita tersebut yaitu sebagai berikut:

a. *Define News*

Berita ini menjelaskan kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Namun, Presiden Prabowo Subianto bersama DPR sepakat untuk menerapkan kenaikan PPN secara selektif, hanya pada barang mewah.

b. *Diagnose Causes.*

Penyebab utama dari ketegangan ini diidentifikasi yaitu:

- 1). Kekhawatiran publik terhadap dampak kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat.
- 2). Kenaikan harga barang yang luas dikhawatirkan akan menekan ekonomi rumah tangga, terutama kelompok menengah kebawah.

c. *Penilaian Moral.*

Moral dalam berita menunjukkan bahwa Kebijakan ini dinilai lebih adil secara moral karena mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat kecil. DPR dan Presiden Prabowo diposisikan sebagai pihak yang mendengarkan aspirasi rakyat dan berusaha menyaring dampak negatif kebijakan fiskal.

d. *Suggest Remedies*

Berita ini menyiratkan beberapa solusi, seperti:

- 1) Penerapan selektif PPN 12%, hanya pada barang mewah.
- 2) Pengecualian untuk kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

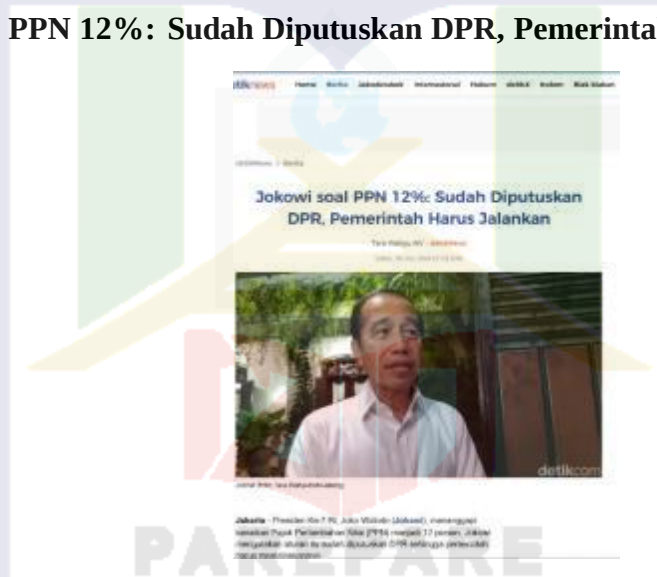
- 3) Kajian lanjutan bersama Kementerian Keuangan untuk implementasi yang tepat.

Kesimpulan framing dalam penelitian ini yaitu:

Framing berita ini mendeskripsikan pemerintah dan DPR sebagai pihak yang responsif terhadap kekhawatiran publik. Kenaikan PPN tetap diberlakukan namun dengan pendekatan selektif untuk melindungi daya beli masyarakat dan menunjukkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi nasional.

- f. Framing PPN sebagai kebijakan legal

“Jokowi soal PPN 12%: Sudah Diputuskan DPR, Pemerintah Harus Jalankan”



Gambar 4.6 28 Desember 2024

Berikut dideskripsikan unsur dalam berita yaitu sebagai berikut: a. Skrip

Berikut deskripsi skrip dalam berita tersebut:

Jakarta –

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku pada tahun 2025. Menurut Jokowi, keputusan tersebut merupakan hasil dari proses legislasi yang telah disepakati antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Ya ini kan sudah diputuskan dalam harmonisasi peraturan perpajakan, sudah diputuskan oleh DPR. Kan sudah diputuskan DPR, ya pemerintah harus menjalankan," ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (27/12/2024), seperti dikutip dari *detikJateng*.

Jokowi menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah melalui proses pertimbangan yang matang dari pihak pemerintah. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah bertindak berdasarkan amanat Undang-Undang.

"Sekali lagi, pemerintah sudah berhitung dan melalui pertimbangan- pertimbangan yang matang. Saya kira kita mendukung keputusan pemerintah. Keputusan itu tentu dibuat dengan pertimbangan yang sudah dikaji, dan ini merupakan amanat undang-undang yang harus dijalankan," tegasnya.

Terkait dampak kenaikan PPN terhadap masyarakat, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah sudah melakukan kalkulasi atas konsekuensi kebijakan tersebut.

"(Dampaknya ke masyarakat) ya, itu semestinya pemerintah sudah berhitung, melakukan kalkulasi dan pertimbangan-pertimbangan," ucap mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

b. Tematik

Berikut deskripsi tematik pada berita tersebut:

Tematama	Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%
Subtema	1. Penegasan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil keputusan DPR. 2. Penjelasan bahwa kebijakan kenaikan PPN adalah amanat Undang-Undang. 3. Keyakinan bahwa pemerintah telah melakukan perhitungan dan pertimbangan dampak terhadap masyarakat. 4. Penekanan pada kepatuhan pemerintah menjalankan hasil keputusan legislatif

c. Retoris

Berikut deskripsi retorika pada berita tersebut:

Retoris Afirmatif	"Kan sudah diputuskan DPR, ya pemerintah harus menjalankan."
	"Pemerintah sudah berhitung dan melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang."

d. Sintaksis

Berikut deskripsi sint

aksis pada berita tersebut:

Kalimat langsung (kutipan langsung)	tokoh utama (Jokowi), digunakan untuk memberikan kesan objektivitas danotentisitas informasi
Kalimat kompleks	menggunakan konjungsi kausal seperti " <i>karena</i> ", " <i>sehingga</i> ", dan " <i>ya...</i> " yang menunjukkan penalaran

Berdasarkan hasil identifikasi unsur berita tersebut maka deskripsi framing dalam berita tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Define News

Berita ini menginformasikan bahwa Presiden Joko Widodo menegaskan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% adalah keputusan yang telah disahkan oleh DPR RI dan menjadi amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Oleh karena itu, pemerintah wajib menjalankannya

b. *Diagnose Causes.*

Penyebab utama dari ketegangan atau kontroversi seputar kebijakan ini diidentifikasi sebagai:

1. Implementasi UU HPP yang mengatur kenaikan PPN secara bertahap.
2. Kekhawatiran masyarakat terkait dampak ekonomi, terutama potensi kenaikan harga barang.

3. Kurangnya sosialisasi atau komunikasi yang efektif dari pemerintah kepada masyarakat sebelum pelaksanaan.

c. *Penilaian Moral.*

Framing moral dalam berita ini menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan keputusan legislatif, sehingga kenaikan PPN bukan merupakan tindakan sepihak atau tidak berdasar. Penilaian moral juga mencerminkan bahwa keputusan pemerintah adalah hasil perhitungan dan pertimbangan yang matang untuk kepentingan negara.

d. *Suggest Remedies*

Berita ini menyiratkan beberapa solusi, seperti:

1. Masyarakat perlu memahami bahwa ini adalah amanat undang-undang dan keputusan DPR.
 2. Pemerintah diharapkan telah melakukan kalkulasi untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat.
 3. Ke depan, komunikasi dan sosialisasi kebijakan fiskal seperti ini perlu diperkuat untuk menghindari miskomunikasi publik.
- Kesimpulan framing dalam penelitian ini yaitu:

Framing berita ini mendeskripsikan kenaikan PPN sebagai sebuah kebijakan legal dan konstitusional yang wajib dijalankan pemerintah. Narasi diarahkan untuk memperkuat legitimasi kebijakan tersebut, sambil menyampaikan bahwa dampak pada masyarakat telah diperhitungkan secara rasional oleh pemerintah. Tekanan diletakkan pada kepatuhan terhadap hukum dan tanggung jawab fiskal negara.

g. Framing PPN sebagai amanat undang-undang

“Puan Ungkap Ada Kekhawatiran PPN 12% Perburuk Kondisi Kelas Menengah”



Gambar 4.07 19 Desember 2024

Berikut dideskripsikan unsur dalam berita yaitu sebagai berikut: a. Skrip

Berikut deskripsi skrip dalam berita tersebut:

Jakarta

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meski demikian, Puan menekankan pentingnya pemerintah untuk mendengar berbagai masukan dari masyarakat terhadap potensi dampak dari kebijakan tersebut.

“UU HPP juga mengamanatkan bahwa pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa PPN yang berlaku pada tahun 2025 adalah sebesar 12 persen. Kita harus cermat memperhatikan dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan

pertumbuhan ekonomi,” ujar Puandalam keterangannya pada Kamis (19/12/2024).

Puan menambahkan bahwa masih ada kekhawatiran dari publik, terutama bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN ini bisa memperburuk kondisi kelas menengah dan pelaku usaha kecil. Ia menyebutkan bahwa konsumsi rumah tangga secara umum berpotensi terdampak, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah.

“Dampak bisa terjadi kepada masyarakat ketika produsen dan pelaku usaha menaikkan harga produk secara antisipatif, sehingga memicu inflasi naik semakin tinggi. Ini yang harus diantisipasi,” lanjutnya.

Menurut Puan, kenaikan tarif PPN dapat mendorong inflasi pada berbagai barang konsumsi harian seperti pakaian, perlengkapan kebersihan, hingga obat-obatan, yang merupakan kebutuhan dasar banyak keluarga.

Ia meminta agar pemerintah benar-benar mengantisipasi dampak tersebut, apalagi mengingat kenaikan tarif dari 11 persen menjadi 12 persen dijadwalkan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Ia juga menekankan bahwa penerimaan pajak seharusnya digunakan secara maksimal untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami memahami bahwa tujuan dari kenaikan PPN ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit anggaran. Namun pemerintah harus tetap memperhatikan dampak sosial-ekonomi yang muncul dari kebijakan tersebut,” tegas Puan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa penerapan PPN 12 persen akan tetap dilakukan, namun akan diberlakukan secara selektif, hanya untuk barang-barang mewah.

“Kan sudah diberi penjelasan, PPN itu adalah amanat undang-undang. Kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (6/12/2024).

b. Tematik

Berikut deskripsi tematik pada berita tersebut:

Tematama	Respons Ketua DPR RI, Puan Maharani, terhadap rencana pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12 %
Subtema	1. Penegasan bahwa kenaikan PPN merupakan amanat UU HPP. 2. Kekhawatiran dampak negatif terhadap daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah. 3. Permintaan agar pemerintah mengantisipasi inflasi dan penurunan konsumsi. 4. Penjelasan dari Presiden Prabowo bahwa kenaikan bersifat selektif (untuk barang mewah).

c. Retoris

Berikut deskripsi retorik pada berita tersebut:

Persuasif dan argumentatif Kutipan langsung dari tokoh penting (Puan Maharani dan Presiden Prabowo) untuk memberikan legitimasi Penggunaan frasa seperti *"harus cermat"*, *"harus diantisipasi"*, dan *"memperburuk keadaan kelas menengah"* yang

memunculkan kesan urgensi dan kepedulian terhadap dampak kebijakan

Kalimat retorik digunakan untuk menekankan perlunya kehati-hatian dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal

d. Sintaksis

Berikut deskripsi sintaksis pada berita tersebut:

Gaya
Informatif
Dan Formal

Kalimat mayor yang kompleks, dengan struktur subjek-predikat-objek-keterangan yang lengkap dan informatif

Transisi antarparagraf berjalan logis, dari pernyataan Puan, dampak kebijakan, hingga tanggapan dari Presiden Prabowo

Berdasarkan hasil identifikasi unsur berita tersebut maka deskripsi framing dalam berita tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Define News

Berita ini mengangkat topik kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025. Fokus utama berita adalah tanggapan Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan amanat dari Undang-Undang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan), namun tetap memerlukan perhatian terhadap dampaknya bagi masyarakat.

b. *Diagnose Causes.*

Penyebab utama dari ketegangan ini diidentifikasi yaitu:

- 1). Penerapan kebijakan kenaikan tarif PPN yang dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat.
- 2). Kurangnya kesiapan atau antisipasi terhadap potensi inflasi.
- 3). Kekhawatiran bahwa kebijakan ini tidak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat berpendapatan menengah dan rendah.
- 4). Belum adanya komunikasi atau penjelasan yang cukup luas dari pemerintah mengenai implementasi selektif untuk barang mewah.

c. *Penilaian Moral.*

Berita ini menyampaikan penilaian moral bahwa:

- 1) Kebijakan fiskal, seperti kenaikan pajak, harus dilakukan dengan pertimbangan keadilan sosial.
- 2) Pemerintah dinilai perlu sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat kecil dan tidak hanya berfokus pada penerimaan negara. Kebijakan tidak boleh memberatkan rakyat, khususnya golongan rentan.

d. *Suggest Remedies*

Berita ini menyiratkan beberapa solusi, seperti:

- 1). Pemerintah harus mendengarkan aspirasi dan masukan dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat kelas menengah dan pelaku usaha kecil.
- 2). Kenaikan PPN harus diiringi dengan peningkatan pelayanan publik.
- 3). Selektivitas penerapan tarif (hanya untuk barang mewah) harus dijelaskan secara terbuka kepada publik.

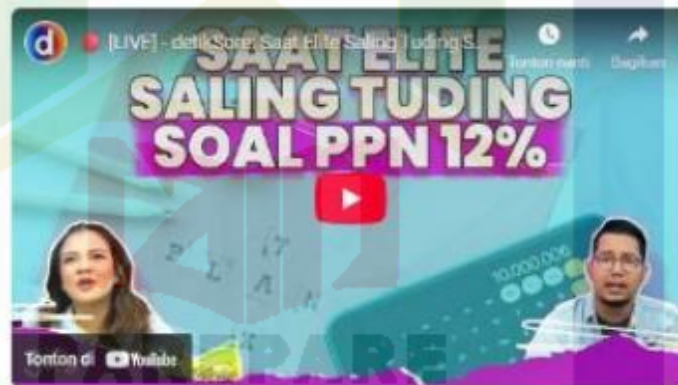
- 4). Pemerintah diminta melakukan pengawasan ketat terhadap inflasi dan stabilisasi harga.

Kesimpulan framing dalam penelitian ini yaitu:

Framing berita ini mendeskripsikan bahwa meskipun kenaikan PPN merupakan amanat undang-undang, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dan berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Pemerintah diminta mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial, serta menyampaikan informasi secara transparan dan bijaksana.

- h. Framing dinamika politik dan konflik di kalangan elite terkait kebijakan PPN 12%

“Saat Elite Saling Tudung Soal PPN 12%”



Gambar 4.8 Senin, 19 Desember 2024

Berikut dideskripsikan unsur dalam berita yaitu sebagai berikut:

- a. Skrip

Berikut deskripsi skrip dalam berita tersebut:

Jakarta

Tidak hanya kalangan masyarakat, elite politik pun heboh menanggapi kenaikan PPN 12%, meski dengan sudut pandang berbeda. Awalnya, pajak itu diposisikan hanya untuk barang mewah, namun kini dipandang berlaku hampir untuk semua objek kecuali sembako. Seiring menggulirnya aksi protes dan petisi, para elite politik saling tuding terkait siapa yang memulai wacana

Usai DPR menetapkan bahwa PPN 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025, protes masyarakat makin masif. Pemerintah menegaskan kebijakan ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Di antara elite politik, PDIP meminta pemerintah meninjau ulang rencana ini, karena dianggap bisa memunculkan masalah bagi awal pemerintahan Presiden Prabowo.

“Kita minta mengkaji ulang apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu dikaji,” ujar Ketua DPP PDIP Deddy Yevri

Deddy menegaskan bahwa ini bukan inisiatif dari PDIP, melainkan usulan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat itu, PDIP memimpin Panja pembahasan UU HPP.

“Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI-Perjuangan, karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah (era Presiden Jokowi)...

Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, menyerang balik:

“Kenaikan PPN 12%, itu adalah keputusan Undang-Undang... dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan.”

Partai NasDem juga menganggap penolakan PDIP tidak konsisten:

“Sekarang PDIP menolak kenaikan PPN 12%, berarti mereka mengkhianati...,” tegas Fauzi Amro

Dengan nada keras, PKB menyarankan PDIP mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi jika keberatan dengan UU, karena PDIP sendiri menyetujui UU HPP saat disahkan.

Menanggapi kritik, PDIP pun membela diri. Wakil Ketua Panja UU HPP Dolfie Othniel Frederic Palit menyatakan UU tersebut adalah inisiatif pemerintah Jokowi dandidukung 8 fraksi DPR, bukan hanya PDIP

b. Tematik

Berikut deskripsitematik pada berita tersebut:

Temautama	Perdebatan antar elit politik mengenai kenaikan PPN 12% yang akan berlakupada 1 Januari 2025
Sub Tema	Konflik politistertkait siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut, sertabagaimanaposisi partai- partai politik seperti PDIP, Gerindra, NasDem, dan PKB menyikapi isu inidiruang publik

c. Retoris

Berikut deskripsiretoris pada berita tersebut:

Retorika yang	“Salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDIP...”
digunakan dalam	“Mereka mengkhianati keputusan yang sudah disahkan DPR...”
aman berita ini	“Kalau tidak setuju, ajukan saja uji materi ke MK...”
menekankan	
konflik dan	
saling tuding	
antar elite politik	

d. Sintaksis

Berikut deskripsi sintaksis pada berita tersebut:

struktur kalimat yang padat, informatif, dan formal	Kalimat-kalimatnya sering disusun dalam bentuk kutipan langsung, dengan subjek berupa tokoh politik dan predikat yang menyatakan sikap, penolakan, atau tuduhan. Penggunaan struktur ini mengarahkan pembaca untuk menafsirkan konflik secara tegas dan eksplisit
---	---

Berdasarkan hasil identifikasi unsur berita tersebut maka deskripsi framing dalam berita tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Define News

Berita ini membingkai isu kenaikan PPN 12% sebagai kontroversi politik, bukan hanya kebijakan fiskal. Fokusnya diarahkan pada konflik antar elite dan upaya saling menyalahkan antara partai pendukung dan pelaksana kebijakan.

b. *Diagnose Causes.*

Penyebab utama dari ketegangan ini diidentifikasi yaitu:

- 1). Ketidakkonsistenan antar elite politik terhadap UU HPP
- 2). Perbedaan interpretasi tiap pengusul awal kebijakan
- 3). Ketidakpuasan publik terhadap rencana kenaikan PPN yang menambah tekanan pada politisi.

c. *Penilaian Moral.*

Berita menunjukkan bahwa ada ketidakjelasan tanggung jawab moral di antara para elite. PDIP dianggap tidak konsisten karena menyetujui UU namun kini menolak implikasinya. Sementara partai lain menilai ini sebagai manuver politik semata. Moralitas elite politik digambarkan sebagai saling lempar tanggung jawab tanpa solusi konkret.

d. *Suggest Remedies*

Berita ini menyiratkan beberapa solusi, seperti:

- 1). Pemerintah perlu lebih transparan dan terbuka terhadap kritik
- 2). Partai yang tidak setuju sebaiknya mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi
- 3). Kebutuhan evaluasi bersama antar partai terhadap pelaksanaan UU HPP

Kesimpulan framing dalam penelitian ini yaitu:

Framing berita ini mendeskripsikan dinamika politik dan konflik narasi yang muncul di kalangan elite dalam menyikapi kebijakan PPN 12%. Media memposisikan isu ini bukan hanya sebagai kebijakan fiskal, tetapi

sebagai alat ukur konsistensi dan integritas elite politik di mata publik. Konflik dan retorika dalam narasi mempertegas bahwa PPN 12% kini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga medan pertarungan legitimasi politik.

- i. Framing kenaikan PPN 12% sebagai langkah terencana dan wajar dari pemerintah

“PPN 12% Berlaku 1 Januari 2025, Sri Mulyani Sebut Masih Rendah”



Gambar 4.9 Senin , 27 Desember 2024

Berikut dideskripsikan unsur dalam berita yaitu sebagai berikut:

- a. Skrip

Berikut deskripsi skrip dalam berita tersebut:

Jakarta

Senin (16/12/2024) – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2025, sesuai

dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi di Kantor Kemenko Perekonomian, Sri Mulyani menegaskan bahwa tarif PPN Indonesia saat ini sebenarnya masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ia membandingkan dengan Brasil (17%), Afrika Selatan (15%), India (18%), Turki (20%), serta setara dengan Filipina (12%), yang justru memiliki tax ratio lebih tinggi. Ia menyoroti bahwa dengan PPN 11%, tax ratio Indonesia berada di sekitar 10,4%, dan dengan penyesuaian menjadi 12%,

tarif tersebut masih dalam jangkauan yang

wajar Grafik perbandingan tarif PPN dan tax ratio: Brasil: PPN 17% - tax ratio 24,67%

Afrika Selatan: 15% - 21,4%

India: 18% - 17,3%

Turki: 20% - 16%

Filipina: 12% - 15,6%

Sri Mulyani menekankan bahwa meskipun PPN dinaikkan, Indonesia tidak perlu menyamaratakan seperti negara-negara lain, tetapi tetap perlu melakukan perbaikan fiskal dengan mempertimbangkan kondisi nasional.

b. Tematik

Berikut deskripsi tematik pada berita tersebut:

Kebijakan pemerintah tentang kenaikan tarif Pajak

Tematama

Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025

Sub Tema
bahwa tarif

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani

ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain, serta dasar hukum pelaksanaannya sesuai Undang-Undang HPP

c. Retoris

Berikut deskripsi retorik pada berita tersebut:

Gaya bahasa
dalam

berita ini bersifat
persuasif dan
argumentatif

Sri Mulyani menggunakan perbandingan dengan negara lain (Brasil, India, Turki, Afrika Selatan) untuk meyakinkan publik bahwa tarif PPN Indonesia masih dalam batas wajar. Istilah teknis seperti “tax ratio” digunakan untuk memperkuat kredibilitas dan objektivitas pernyataannya.

d. Sintaksis

Berikut deskripsi sintaksis pada berita tersebut:

Sebagian besar bersifat informatif dan formal. Kalimat-kalimat utama disusun secara runtut:

Struktur Kalimat	pernyataan kebijakan, penjelasan perbandingan internasional, dan data pendukung. Kalimat aktif dominan, memperjelas aktor yang menyatakan kebijakan (yaitu pemerintah dan Sri Mulyani)
------------------	--

Berdasarkan hasil identifikasi unsur berita tersebut maka deskripsi framing dalam berita tersebut yaitu sebagai berikut:

a. *Define News*

Berita ini mendefinisikan peristiwa sebagai implementasi lanjutan dari UU HPP, yaitu kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.

b. *Diagnose Causes.*

Penyebab utama dari ketegangan ini diidentifikasi yaitu:

Dorongan untuk meningkatkan pendapatan negara dan memperbaiki rasio pajak nasional. Pemerintah menilai bahwa tarif PPN yang berlaku masih rendah dibandingkan negara-negara lain.

c. *Penilaian Moral.*

Langkah pemerintah (dalam hal ini Sri Mulyani) dinilai rasional dan bertanggung jawab. Penekanan pada bahwa kebijakan ini “diperhitungkan dengan matang” menunjukkan bahwa pemerintah tidak gegabah dalam mengambil keputusan fiskal.

d. *Suggest Remedies*

Berita ini menyiratkan beberapa solusi, seperti:

- 1). Menekankan bahwa kenaikan tarif tidak otomatis akan berdampak luas karena masih dalam batas wajar.
- 2). Pemerintah diminta tetap menjaga daya beli dan melakukan evaluasi dampak inflasi secara hati-hati
- 3). Menyampaikan informasi secara terbuka agar publik memahami dasar keputusan ini

Kesimpulan framing dalam penelitian ini yaitu:

Framing berita ini mendeskripsikan kebijakan kenaikan PPN sebagai langkah terencana dan wajar dari pemerintah untuk memperkuat fondasi fiskal nasional. Dengan perbandingan global dan penjelasan teknis, berita ini membentuk persepsi bahwa kebijakan tersebut dapat diterima dan tidak merugikan secara signifikan. Pemerintah diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab dan transparan.

- j. Framing kebijakan pemerintah sebagai respons bijak dan terarah menghadapi tantangan fiskal

“PPN 12% Hanya Barang Mewah, PAN: Keberpihakan Prabowo ke Rakyat Tak Diragukan”



Gambar 4.10 Rabu, 01 Januari 2025

Berikut dideskripsikan unsur dalam berita yaitu sebagai berikut:

a. Skrip

Berikut deskripsi skrip dalam berita

tersebut: Jakarta, Rabu (1/1/2025),

21:58 WIB

Presiden Prabowo Subianto menetapkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% hanya berlaku bagi barang mewah, efektif mulai 1 Januari 2025. Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa kebijakan ini menunjukkan keberpihakan Prabowo terhadap rakyat kecil.

“Ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Sensitivitas dan keberpihakan Prabowo pada rakyat kecil tak perlu diragukan lagi. Karena itu, jangan terlena ikut berpolemik di media sosial yang tidak berujung,” jelas Saleh dalam keterangan persnya, Rabu (1/1/2025)

Saleh juga mengapresiasi pemerintah yang telah menyediakan paket stimulus ekonomi senilai Rp 38,6 triliun untuk mendorong mitigasi dampak dari kenaikan PPN 12%, meyakini keputusan ini telah mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan politik.

b. Tematik

Berikut deskripsi tematik pada berita tersebut:

Temautama kenaikan	Klarifikasi dan penegasan pemerintah bahwa PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah, bukan kebutuhan pokok dan dukungan politik
Sub Tema	PAN terhadapkebijakan tersebut sebagai bukti keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil

c. Retori

Berikut deskripsiretoris pada berita tersebut:

Persuasif Dan Afirmatif	“Sensitivitas dan keberpihakan Prabowo pada rakyat keciltak perlu diragukan lagi...” Gaya ini memperkuat persepsi positif terhadap pemerintah dan menghindari perdebatan publik yang tidak produktif. Selain itu, diksi seperti “janganterlena ikut berpolemik” menunjukkan ajakan untuk tetap tenang dan percaya pada kebijakan pemerintah.
-------------------------------	--

d. Sintaksis

Berikut deskripsi sintaksis pada berita tersebut:

Kalimat deklaratif dan kutipan langsung dari narasumber politik	Susunan kalimatnya ringkas, formal, dan bertujuan informatif, dengan subjek yang jelas (Prabowo, PAN, Saleh) diikutitindakan ataupernyataan mereka
--	--

Berdasarkan hasil identifikasi unsur berita tersebut maka deskripsi framing dalam berita tersebut yaitu sebagai berikut:

a. *Define News*

Berita ini menginformasikan bahwa kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% tidak berlaku secara menyeluruh, hanya untuk barang mewah dan menegaskan bahwa kebijakan ini sudah dipertimbangkan secara sosial dan ekonomi.

b. *Diagnose Causes.*

Penyebab utama dari ketegangan ini diidentifikasi yaitu:

Penyebab munculnya ketegangan adalah kekhawatiran publik bahwa semua barang akan terkena PPN 12%, yang dapat berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat dan UMKM.

c. *Penilaian Moral.*

PAN melalui Saleh Dauly memberikan penilaian bahwa keputusan Prabowo merupakan bentuk keberpihakan kepada rakyat kecil dan sejalan dengan semangat keadilan sosial serta kepemimpinan yang sensitif terhadap kondisi masyarakat bawah.

d. *Suggest Remedies*

Berita ini menyiratkan beberapa solusi, seperti:

- 1). Penerapan selektif PPN hanya pada barang mewah.
- 2). Penyediaan stimulus ekonomi Rp 38,6 triliun untuk mitigasi dampak.
- 3). Ajakan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh isu liar di media sosial.

Kesimpulan framing dalam penelitian ini yaitu:

Framing berita ini mendeskripsikan kebijakan pemerintah sebagai respons bijak dan terarah dalam menghadapi tantangan fiskal, dengan tetap menjaga keberpihakan terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah, serta mencoba menenangkan opini publik yang sempat tegang akibat miskomunikasi kebijakan PPN 12%.

B. Pembahasan

Detik News merupakan salah satu media daring yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik di Indonesia. Dalam setiap pemberitaannya, *Detik News* menunjukkan gaya penulisan yang cepat, padat, dan langsung ke pokok permasalahan. Pemberitaan mereka sering memuat kutipan langsung dari tokoh-tokoh penting untuk memperkuat validitas berita. Pemilihan narasumber cenderung berasal dari elite politik dan pejabat negara. Hal ini menunjukkan posisi *Detik News* sebagai media arus utama yang dekat dengan sumber kekuasaan.

Dalam isu PPN 12%, *Detik News* cenderung melakukan framing yang mengedepankan klarifikasi pemerintah. Berita-berita yang dimuat cenderung membela kebijakan fiskal yang ditetapkan. Misalnya, dengan menekankan bahwa kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah. Framing ini menurunkan eskalasi kekhawatiran publik yang awalnya mengira semua barang akan dikenakan tarif lebih tinggi. Strategi ini menciptakan kesan bahwa pemerintah tetap berpihak kepada rakyat kecil.

Detik News juga menunjukkan framing positif terhadap tokoh-tokoh tertentu, seperti Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Keduanya digambarkan sebagai pemimpin yang mempertimbangkan nasib rakyat sebelum memutuskan kebijakan. Narasi ini memperkuat citra bahwa kebijakan pemerintah telah melalui pertimbangan matang. Dalam banyak berita, kutipan langsung dari pejabat digunakan untuk memberikan pembenaran kebijakan. Hal ini memperlihatkan bahwa *Detik News* tidak netral sepenuhnya, tetapi cenderung pro status quo.

Pemilihan judul berita oleh *Detik News* sangat penting dalam framing. Judul-judul mereka biasanya provokatif namun tetap faktual. Contohnya seperti: “PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah” atau “Pemerintah Harus Jalankan Amanat UU”. Judul seperti ini menenangkan publik sekaligus menyampaikan bahwa kebijakan tidak akan membebani semua lapisan masyarakat. Ini adalah bentuk framing yang menurunkan efek kepanikan publik.

Dari segi struktur berita, *Detik News* mengadopsi pola piramida terbalik. Informasi penting diletakkan di awal paragraf, sementara penjelasan tambahan diletakkan di akhir. Ini merupakan teknik klasik dalam jurnalisme yang bertujuan untuk mengakomodasi pembaca yang tidak membaca keseluruhan isi berita. Namun dalam konteks framing, struktur ini juga memungkinkan *Detik News* mengarahkan opini publik sejak kalimat pertama. Dengan demikian, pembaca bisa langsung menangkap sudut pandang yang ingin ditonjolkan.

Dalam pemberitaan tentang PPN 12%, *Detik News* juga aktif mengutip pendapat pengamat ekonomi dan akademisi. Namun narasi dari pengamat cenderung diletakkan setelah pernyataan resmi pemerintah. Ini memberi kesan bahwa pendapat non-pemerintah adalah pelengkap, bukan

informasi utama. Strategi ini memperkuat kerangka berita bahwa kebijakan pemerintah adalah sesuatu yang sudah final. Dengan demikian, kritik yang muncul terdengar sebagai catatan kecil, bukan oposisi besar.

Framing *Detik News* juga memperlihatkan kecenderungan untuk meredam perdebatan politik. Misalnya, ketika elite saling tuding soal PPN, pemberitaan disusun dengan narasi bahwa perbedaan pendapat adalah bagian dari dinamika demokrasi. Konflik antar tokoh tidak diperbesar secara emosional adalah strategi untuk menjaga stabilitas informasi dan menghindari polarisasi publik. Namun, dalam konteks kritis, pendekatan ini bisa dianggap menutupi kompleksitas masalah. Penekanan pada aspek hukum dan undang-undang dalam pemberitaan juga menjadi pola framing khas *Detik News*. Kalimat seperti “sudah diputuskan oleh DPR” atau “amanat Undang-Undang” sering muncul. Ini menunjukkan bahwa media ingin menampilkan kebijakan sebagai bagian dari sistem yang sah. Hal ini menciptakan persepsi bahwa masyarakat tidak memiliki pilihan selain mengikuti keputusan tersebut. Pada akhirnya, framing ini menegaskan kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam sistem politik Indonesia.

Salah satu kekuatan framing *Detik News* terletak pada konsistensi informasi lintas berita. Dalam beberapa hari terakhir, narasi tentang PPN 12% di berbagai berita mereka menunjukkan kesinambungan. Tidak ada kontradiksi besar antar judul atau isi berita. Ini memperkuat persepsi bahwa kebijakan yang diambil pemerintah adalah koheren dan terstruktur. Konsistensi ini juga membuat pembaca merasa informasi yang diperoleh adalah kredibel.

Framing ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai keberagaman sudut pandang. Berita dari masyarakat sipil, organisasi buruh, atau pelaku UMKM sangat minim diekspos. Suara-suara dari bawah lebih sering muncul di bagian akhir atau dalam bentuk kutipan singkat menunjukkan bahwa *Detik News* lebih fokus pada narasi dari atas ke bawah. Akibatnya, pemberitaan menjadi kurang representatif terhadap kompleksitas dampak kebijakan PPN di lapangan.

Dari sisi retorik, gaya bahasa *Detik News* sangat mudah dipahami. Kalimat-kalimat pendek dan langsung ke pokok permasalahan menjadi ciri khas. Ini efektif untuk menjangkau pembaca dari berbagai latar belakang. Namun, gaya ini juga dapat menyederhanakan isu yang sebenarnya rumit. Akibatnya, framing yang dihasilkan cenderung satu dimensi. Visualisasi juga memainkan peran penting dalam framing *Detik News*. Foto-foto tokoh yang sedang berbicara atau memberikan keterangan resmi memperkuat legitimasi isi berita. Tidak jarang visual yang dipilih menunjukkan ekspresi serius atau tegas dari pejabat. Ini membentuk persepsi bahwa isu yang dibahas sedang ditangani dengan serius. Framing visual ini mendukung narasi teks yang ingin disampaikan.

Berita-berita yang dimuat juga memiliki ritme yang cepat dan terbarukan. Setiap perkembangan baru dari kebijakan PPN langsung ditanggapi dengan berita lanjutan. Ini menunjukkan bahwa *Detik News* ingin mengontrol narasi dan memandu pembaca melalui setiap fase kebijakan. Dalam konteks framing, kecepatan ini membuat opini publik lebih mudah diarahkan. Namun juga bisa mengakibatkan pembaca tidak sempat melakukan refleksi kritis.

Kedekatan *Detik News* dengan elite politik terlihat jelas dalam akses informasi. Sumber berita utama berasal dari konferensi pers resmi atau pernyataan langsung pejabat. Hal ini memudahkan media untuk mengatur alur berita sesuai dengan pernyataan yang dianggap otoritatif. Dengan begitu, framing yang dibentuk lebih mengarah pada legitimasi otoritas negara. Sayangnya, hal ini berisiko mengabaikan suara-suara minoritas.

Detik News juga memanfaatkan fitur “Baca juga” untuk mengarahkan pembaca ke berita relevan lainnya. Fitur ini secara tidak langsung memperluas jangkauan framing yang telah dibentuk. Dengan membaca berita-berita tambahan yang seirama, pembaca akan semakin terpengaruh oleh sudut pandang tertentu. Ini adalah teknik framing terstruktur dalam jurnalisme digital. Efektivitasnya terletak pada kelanjutan narasi yang dibangun secara sistemik.

Dalam media massa, framing bisa menjadi alat untuk membentuk opini atau membatasi pemahaman. *Detik News* tampak memahami hal ini dengan baik. Mereka tidak menyajikan berita secara mentah, melainkan melalui lensa tertentu. Lensa tersebut umumnya mendukung stabilitas politik dan ekonomi nasional. Ini membuat mereka tampil sebagai media yang “aman” bagi penguasa. Namun, dari perspektif jurnalistik kritis, framing semacam ini bisa menimbulkan ketimpangan informasi. Ketika kritik dari masyarakat sipil kurang mendapatkan ruang, maka informasi yang dikonsumsi publik menjadi tidak seimbang. Dalam jangka panjang, ini bisa menggerus kepercayaan publik jika ternyata kebijakan berdampak buruk. Oleh karena itu, penting bagi *Detik News* untuk tetap membuka ruang baginawasi alternatif. Termasuk dari masyarakat bawah dan kelompok rentan.

Sebagai media daring, *Detik News* memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk literasi publik terhadap kebijakan negara. Framing yang terlalu “ramah pemerintah” memang dapat menciptakan ketenangan jangka pendek. Namun, tanpa kritik yang seimbang, berita bisa kehilangan fungsinya sebagai alat kontrol sosial. Oleh sebab itu, keseimbangan narasi menjadi kunci penting dalam pemberitaan ke depan. Terutama dalam isu yang berdampak langsung pada masyarakat luas seperti PPN.

Framing dalam *Detik News* lebih bersifat struktural dibanding emosional. Artinya, mereka lebih fokus menyampaikan fakta dalam kerangka kebijakan resmi ketimbang memainkan emosi publik. Ini adalah pendekatan profesional namun bisa menjadi monoton. Oleh sebab itu, variasi dalam sudut pandang dan kedalaman analisis sangat dibutuhkan. Agar media tetap relevan dan dipercaya oleh semua kalangan. *Detik News* melakukan framing pemberitaan dengan menekankan legitimasi kebijakan, konsistensi narasi, dan kecepatan informasi. Namun framing ini masih kurang membuka ruang bagi keragaman perspektif. Untuk menjaga kepercayaan publik, keseimbangan antara narasi resmi dan kritik harus dijaga. Pemberitaan yang mencerminkan kompleksitas sosial akan lebih adil dan demokratis. Inilah tantangan terbesar *Detik News* di era digital saat ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa pemberitaan *Detik News* dimana masalah utama yang diangkat adalah rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% dan dampaknya terhadap masyarakat. Media mendefinisikan masalah ini sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang harus dilaksanakan sesuai Undang-Undang HPP. Meski ada kekhawatiran publik, *Detik News* cenderung

membingkai masalah ini sebagai konsekuensi dari regulasi formal, bukan sebagai ancaman langsung terhadap masyarakat miskin. Framing ini membuat pembaca melihat masalah bukan pada kebijakannya, tapi pada perlunya komunikasi yang tepat dari pemerintah. Dengan kata lain, masalah diletakkan dalam ranah implementasi dan persepsi, bukan substansi kebijakan.

Dari keempat fungsi tersebut, terlihat jelas bahwa *Detik News* menggunakan pendekatan *selection* dan *salience* dengan sangat terstruktur. Mereka memilih untuk menonjolkan aspek legalitas kebijakan, keberpihakan pemerintah dan penyesuaian bagi barang mewah sambil meredam narasi ketidaksetujuan publik. Fakta-fakta yang bisa memperlihatkan resistensi atau penderitaan masyarakat bawah cenderung tidak ditonjolkan merupakan manifestasi nyata dari teori Entman, dimana media berperan aktif dalam menyusun makna dan bukan sekadar menjadi saluran informasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan penelitian yaitu media Detik.com melakukan framing pemberitaan mengenai kenaikan PPN 12% dengan identifikasi definisi masalah yaitu bahwa kebijakan kenaikan PPN diposisikan sebagai isu fiskal yang menimbulkan kekhawatiran publik serta polemik di kalangan elite politik. Diagnosis masalah yaitu keputusan pemerintah dianggap belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan kurangnya komunikasi mengenai penerapan selektif kebijakan tersebut. Penilaian moral yaitu kebijakan fiskal seharusnya berpihak pada keadilan sosial dan tidak memberatkan rakyat kecil, sementara elite politik dinilai lebih banyak saling menyalahkan daripada memberikan solusi. Saran solusi yaitu pemerintah disarankan menerapkan kebijakan secara selektif hanya untuk barang mewah, memperkuat komunikasi publik, menjaga daya beli masyarakat, serta memberikan stimulus ekonomi untuk memitigasi dampak negatif.

B. Saran

1. Kepada Detik News

Media diharapkan dapat menerapkan prinsip keberimbangan dalam setiap pemberitaan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti kenaikan tarif PPN. Penting bagi Detik.com untuk tidak hanya menyoroti sisi legalitas dan dukungan elite politik, tetapi juga memberi ruang bagi

suara masyarakat terdampak, pelaku usaha kecil, dan kelompok menengah ke bawah.

2. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan framing media lain seperti Kompas, CNN Indonesia, atau Tempo, guna melihat sejauh mana keberagaman narasi yang ditampilkan dalam pemberitaan isu ekonomi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

- Ahmadi, Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Gramedia Pustaka Utama, 2021) Amin, S. M. Jurnalistik: Teori dan Praktik. (Biti Djaya, 2018)
- Anggara, B. Konstruksi Realitas Berita Mengenai Kebijakan Jokowi Dalam Menaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Media Online viva.co.id Tahun 2014. *Dunia Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman*, 3(3), 63–77 (2021)
- Anggoro, *Politik dan Kekuasaan* (Analisis Framing Model Robert, 2020)
- Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi*. (RajaGrafindo Persada, 2018)
- David. *Teori Komunikasi Media, Teknologi, dan Masyarakat*. (terj. Teguh Wahyu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021)
- Deddy. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2020)
- Dharma, Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial. (Kanal: *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2018)
- Dwiyanto, Agus dkk. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2023)
- Elfa, “Analisis Drone Emprit Kenaikan Harga BBM 2022 dalam Perspektif UU Keterbukaan Informasi Publik” (Medkom: *Jurnal Media dan Komunikasi* Volume 3 Nomor 1 (2022) 57-73 <https://e-journal.unair.ac.id/Medkom>)
- Eriyanto. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021)
- Fatchan, A. *Metode penelitian kualitatif*. (Prenada Media., 2023)
- Juliana, “Analisis Framing Pemberitaan Kenaikan Harga Bbm Subsidi Pada Media Online Topmetronews Periode September 2022, (*Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya*, 2020)
- Kamaluddin, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Karman. Konstruksi Realitas Sosial sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoritis terhadap Konstruksi Realitas Peter L. Berger) . (*Jurnal Penelitian Komunikasi*, 2021)
- Kustadi, *Pengantar Jurnalistik*, (Bandung : Nuansa, 2020)
- Kuswarno, *Etnografi Komunikasi*. (Bandung: Widya Padjadjaran. 2021)

- Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan dan Implementasi*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2018)
- Mas'ud. *Birokrasi di Negara Birokratis*. (Malang: UMM Press, 2020)
- Mc Quail, *Media performance: Mass communication and the public interest*. (London: Sage Publications, 2020)
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. ke-1, 2019)
- Minja, D. *Transformational Corporate Leadership*. (North Carolina: Integrity Publishers, 2021)
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Remaja Rosdakarya.2022)
- Mondry. *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*.(Bogor: Ghalia Indonesia, 2020)
- Muhammad, *Jurnalistik (Teori dan Praktek)*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2019)
- Nasrullah, *Etnografi Virtual Riset Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi di Internet*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018)
- Nur Hidayat, “Analisis Framing Independensi Pemberitaan Media Online Detik.Com Pasca Pemungutan Suara Pemilihan Presiden 17 April 2019” (Jurnal Al „Adad)
- Nurhadi. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Ar-Ruzz Media, 2023)
- Peterson, *Handbook of. Organizational Culture and Climate*. (California: SAGE Publications, 2021)
- Rolnicki, dkk. *PengantarDasar Jurnanisme*. (Jakarta : Kencana, 2020)
- Sari, S. *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Praktik*. (Rajawali Pers.2022)
- Septiawan Santana K., “Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022) Suf. *Jurnalisme Universal*. (Bandung : TERAJU, 2020)
- Supriyanto, *Pengantar Teknologi Informasi*. (Makassar : Salemba Empat. 2022)
- Sutopo, H. B. *Metodologi penelitian kualitatif*. (CV. Raja Grafindo Persada, 2020)
- TIM Penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi”, (ParePare: IAIN Parepare, 2022)

Uchjana. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2022)

Werner J Severin. *Teori Komunikasi*. (Jakarta : Kencana, 2021)







DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
NOMOR : B-546/In.39/PP.00.9/PPs.05/02/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang**
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2025
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :**
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2307381/2024, tanggal 28 Februari 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: B-546/In.39/FUAD.03/PP.00.9/02/2024 Tahun 2024, tanggal 28 Februari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah;
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan**
- Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2025
 - Menunjuk saudara: **Nahrul Hayat, M.I.Kom.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : ST.MAHDINAR MUHSENG
NIM : 19.3600.010
Program Studi : Jurnalistik Islam
Judul Penelitian : FRAMING PEMBERITAAN KENAIKAN PPN 12% DI PORTAL BERITA DETIK NEWS
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 28 Februari 2024

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP 196412311992031045

SKRIPSI ST MAHDINAR MUHSENG TURNITIN.docx

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1**repository.iainpare.ac.id**

Internet Source

8%**2****Submitted to UIN Walisongo**

Student Paper

4%**3****www.detik.com**

Internet Source

4%**4****finance.detik.com**

Internet Source

2%**5****e-journal.unair.ac.id**

Internet Source

1%**6****infokini.id**

Internet Source

1%**7****repositori.uma.ac.id**

Internet Source

1%**8****travel.detik.com**

Internet Source

1%**9****Submitted to Sriwijaya University**

Student Paper

1%**10****www.teropongsenayan.com**

Internet Source

1%**11****repository.uin-suska.ac.id**

Internet Source

<1%

BIODATA PENULIS



Nama ST.MAHDINAR MUHSENG Lahir di Parepare, 25 April 2001. Anak Kedua dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Muhseng dan Ibu Hasmia. Pendidikan yang di tempuh penulis yaitu SDN 103 Kecamatan Suppa dan Lulus tahun 2012, SMPN 3 Suppa masuk pada tahun 2012 dan lulus tahun 2015, melanjutkan jenjang di SMAN 4 Pinrang dan lulus tahun 2019. Hingga kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi JURNALISTIK ISLAM, penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di LOKASI PPL di instansi TutarKata.com pada Tahun 2022 kemudian melaksanakan Kuliah Pengabdian

Masyarakat Dirumah karena lagi mengalami Fase Hamil Muda yg mungkin bisa berdampak fatal jika dilaksanakan diluar kota dan Kampus memberikan kebijakan tersebut pada tahun 2022 dan menyelesaikan tugas akhirnya yang berjudul Framing Pemberitaan Kenaikan PPN12% diportal Berita Detik.com.